



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

JURNAL MIGAS

Issue 04 Juli-Desember 2019

Awal Tahun 2020

B30

Siap Diimplementasikan

SAJIAN UTAMA

Pembagian Konkrit untuk Nelayan dan Petani Sasaran Terus Meluas

BERANDA

Peresmian Gedung Ibnu Sutowo, "Kita Banyak Belajar dari Beliau"

SOROT

Urus SKUP Kini Tak Lagi Ribet





Lawan KORUPSI

Demi Kemakmuran Negeri...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id



Awal Tahun 2020 B30 Siap Diimplementasikan

JURNAL MIGAS
Issue 04 Juli-Desember 2019



Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin bersama kabinet 2019-2024 dengan slogan "Indonesia Maju" siap mengimplementasikan berbagai program kerja yang telah ditetapkan. Tak sekadar rutinitas yang monoton, program-program kerja yang telah ditetapkan diharapkan turut membawa Indonesia maju.

Salah satunya melalui penggunaan campuran biodiesel 30% menggunakan Bahan Bakar Nabati (B30). Penerapan implementasi B30 dilakukan karena Indonesia harus mencari sumber-sumber energi baru terbarukan (EBT). Selain itu, Indonesia tak boleh terus bergantung dengan energi fosil yang pasti akan habis. Tak hanya itu, pengembangan EBT juga menunjukkan komitmen Indonesia menjaga kelestarian bumi.

Program-program di sub sektor migas lainnya juga terus bergulir. Utamanya untuk menyejahterakan masyarakat luas, seperti Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk nelayan atau lebih dikenal dengan pemberian paket perdana Konverter Kit (konkit) bagi nelayan. Kini, tak hanya nelayan, petani dengan memenuhi syarat tertentu juga disasar dalam program serupa.

Ulasan lebih jelas mengenai penerapan program-program di atas tersaji di Jurnal Migas edisi ini. Tak ketinggalan, *update* program-program sub sektor migas atau berbagai kegiatan lainnya juga bisa Anda nikmati di edisi ini, misalnya skema *cost recovery*, neraca dagang Indonesia dan lain-lain. Semoga berbagai informasi yang tersaji bermanfaat bagi kita semua. Selamat membaca.



30

>> SOSOK

Arifin Tasrif Jabat Menteri ESDM yang Baru

Presiden Joko Widodo telah melantik dan mengambil sumpah Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/10) pagi. Ia menggantikan Ignasius Jonan yang menduduki jabatan Menteri ESDM sejak 14 Oktober 2016.

20

>> BERANDA

Pembagian Konkrit untuk Nelayan dan Petani Sasaran Terus Meluas

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan petani, terus menjadi prioritas Pemerintah. Berbagai program dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan petani. Salah satunya adalah Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran atau lebih dikenal dengan pemberian paket perdana Konverter Kit (konkit) bagi nelayan. Sama halnya dengan nelayan, kini Pemerintah juga menggulirkan program serupa bagi petani.

JURNAL MIGAS
Issue 04 Juli-Desember 2019

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab **Sekretaris Direktorat Jenderal Migas**
Redaktur **Mohammad Alfansyah**
Editor/ Penyunting **Akhmad Fauzi Budiman, Rizky Amalia Wismashanti**
Desain Grafis dan Fotografer **Waris Sambodo, Maria Paulina, Krisna Dinda**
Sekretariat **Sinta Raesanti, Kabul Priyono, Hilda Swandani**
Kontributor **Tursilowulan Wahyu, Rizky Amalia, Krisna Dinda**
Litbang **Agus Mendrofa, Rizki Hartanto.**

6 SAJIAN UTAMA

Awal Tahun 2020 B30 Siap Diimplementasikan

10 Pembagian Konkrit untuk Nelayan dan Petani Sasaran Terus Meluas

16 BERANDA

Peresmian Gedung Ibnu Sutowo, "Kita Banyak Belajar dari Beliau"

18 SOROT

Dikaji Ulang, Skema *Cost Recovery* Dapat Menambah Opsi Investasi

21 Urus SKUP Kini Tak Lagi Ribet

22 SOSOK

Arifin Tasrif Jabat Menteri ESDM yang Baru

26 KOLOM

Strategi Menggairahkan Investasi Migas

29 Siap Membangun 4,7 Juta Sambungan Jaringan Gas Bumi

32 BICARA DATA

34 PARADE FOTO

36 NEWS

Pemerintah Tangani Kecelakaan PHE ONWJ Hingga Tuntas

Penandatanganan Komitmen Pembangunan Jargas Tahun 2020

Kementerian ESDM Luncurkan Aplikasi Perizinan *Online*

Pengumuman Pemenang Lelang WK Migas Konvensional Tahap II

Perlu Dikoreksi, Neraca Dagang Indonesia Defisit Akibat Impor Migas

Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 Dorong Kemitraan Industri Gas

Pameran dan Konvensi IPA ke-43 Diikuti 20.000 Pelaku Industri Migas

Ditjen Migas Terima Kunjungan Departemen Energi Filipina

6

>> SAJIAN UTAMA

Awal Tahun 2020 B30 Siap Diimplementasikan

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor minyak terus bergulir. Salah satunya melalui penggunaan campuran biodiesel 30% menggunakan Bahan Bakar Nabati (B30).

contents



Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-74 Tekankan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan

Delapan Perusahaan Migas Terima Subroto Award 2019

The 6th IJEF: Indonesia-Jepang Perkuat Komitmen Pengembangan Blok Masela

Pelayanan Fiskal Hulu Migas Kini Serba *Online*

Ditjen Migas Peduli Kanker Payudara dan Mulut

Waspada Potensi Kebakaran, Ditjen Migas Gelar Pelatihan APAR

Migas Raih Wilayah Bebas Korupsi

Migas Goes To Campus di Universitas Jenderal Soedirman

Ditjen Migas Berikan Apresiasi Keselamatan Migas

Rakor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas

Tunjang Penerapan Quality Assurance (QA), Ditjen Migas Gelar Workshop

Pengelolaan WK Corridor Berlanjut, Negara Terima USD250 Juta

Konversi BBM ke BBG Terus Berlanjut, SPBG dan Jargas Karawang Diresmikan

Plt Dirjen Migas Dampingi Menteri ESDM ke Kilang Balikpapan dan Blok Mahakam

Awal Tahun 2020 B30 Siap Diimplementasikan

Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor minyak terus bergulir. Salah satunya melalui penggunaan campuran biodiesel 30% menggunakan Bahan Bakar Nabati (B30).

Penggunaan komposisi minyak sawit, yakni Fatty Acid Methyl Ester (Fame) pada Biosolar akan mencapai 30% pada awal 2020. Kesiapan ini tak lepas dari hasil uji coba penggunaan B30 pada kendaraan bermesin diesel yang selesai akhir Oktober lalu. Hal ini diungkapkan oleh Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto di hadapan civitas academica Universitas Udayana (17/9).

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan



Bakar Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2015, bahwa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional, maka Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak dan Pengguna Langsung Bahan Bakar Minyak wajib menggunakan BBN (Biofuel) sebagai bahan bakar lain secara bertahap.

Road Test B30

Tahapan pelaksanaan mandatori Biodiesel telah dilakukan sejak tahun 2008 silam. Kala itu, diterapkan kebijakan penggunaan campuran Biodiesel 2% (B2) melalui Peraturan Menteri ESDM No.32/2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Penerapan campuran Biodiesel beranjak naik



sejak itu hingga memasuki rencana penerapan B30 di tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2015, tahapan

pencampuran Biodiesel sebagai Program Mandatori adalah sebagai berikut:

TAHAPAN KEWAJIBAN PENCAMPURAN BIODIESEL				
SEKTOR	APRIL	JANUARI	JANUARI	JANUARI
	2015	2016	2020	2025
Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Transportasi dan PSO	15 %	20 %	30 %	30 %
Transportasi non PSO	15 %	20 %	30 %	30 %
Pembangkit Listrik	25 %	30 %	30 %	30 %
Industri dan Komersial	15 %	20 %	30 %	30 %

Pada tahun ini, Kementerian ESDM c.q. Ditjen Migas telah melakukan Uji Jalan (*Road Test*) B30 untuk kendaraan bermesin diesel beberapa waktu lalu. *Road Test* ini melibatkan dua jenis kendaraan, yakni berkapasitas ffi 3,5 ton dan ffi 3,5 ton.

Pada kendaraan berkapasitas ffi 3,5 ton, *Road Test* dilakukan selama 125 hari yang terbagi atas *Road Test* 89 hari dan pengujian 36 hari. Rute *Road Test* dari Lembang-Nagrek-Kuningan-Guci-Subang dengan jarak tempuh keseluruhan 50.000 km atau 560 km/hari.

Sementara itu, *Road Test* untuk kendaraan ffi 3,5 ton mengambil rute Lembang-Pasteur-Karawang-Subang selama 130 hari (*Road Test* 115 hari dan pengujian 15 hari). Total jarak tempuhnya 40.000 km atau 350 km/hari.

Hasil *Road Test* B30 tersebut adalah sebagai berikut:

- Tidak ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan B20 dan B30 terhadap hasil uji pelumas.
- Kinerja kendaraan dengan menggunakan B30:
 - Daya turun sampai dengan 1,7% dan naik sampai dengan 1,6% tergantung dari teknologi *engine* kendaraan.



Biosolar mampu menekan angka impor Minyak Solar. Selain itu juga mampu menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan, pun dari segi ekonomi mampu membantu perekonomian para petani sawit."

Djoko Siswanto

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi



- *Fuel economy* turun sampai dengan 3,6% dan naik sampai dengan 2,6% tergantung dari teknologi *engine* kendaraan.
 - Emisi gas buang CO lebih rendah berkisar 0,1–0,2 g/km terhadap ambang batas (1,5 g/km).
 - Emisi THC mengalami penurunan sampai 46% dan kenaikan sampai dengan 9,9%.
 - Emisi Nox naik sampai dengan 5,6%.
 - Emisi PM lebih rendah berkisar 0,01–0,06 g/km terhdap ambang batas (0,17 g/km).
 - Kendaraan baru atau yang sebelumnya tidak menggunakan Biodiesel cenderung mengalami penggantian filter lebih cepat di awal penggunaan B30, namun sesudahnya kembali normal.
3. *Rating* komponen:
- *Scratch* yang terjadi pada piston kendaraan yang menggunakan bahan bakar B20 maupun B30 dianggap sebagai hal yang wajar oleh seluruh pihak APM. *Scratch* tersebut juga bukan disebabkan oleh bahan bakar.
 - Deposit yang terjadi, baik pada *valve* maupun *injector* bukan disebabkan oleh bahan bakar.

Rekomendasi:

- Untuk menjaga kualitas B30, selama proses pencampuran, penyimpanan, dan penyaluran perlu dilakukan tindakan penangan terkontrol dan termonitor secara berkala, seperti halnya pada saat *Road Test* B30.
- Biodiesel (B100) sebaiknya disimpan dalam tangki tertutup dan dihindarkan dari kontrak dengan udara dan segera dilakukan pencampuran dengan BO.

- Biodiesel (B100) yang digunakan pada campuran B30 diusulkan memiliki kadar monogliserida (MG) maksimum sebesar 0,55%-massa, dan kadar air maksimum sebesar 350 ppm.
- Direkomendasikan kepada APM untuk memberikan informasi kepada konsumen yang menggunakan kendaraan baru bahwa di awal pemakaian dapat terjadi penggantian filter yang lebih cepat.

Uji jalan ini dilakukan secara transparan, terbuka, dan objektif. Dalam beberapa kesempatan, sejumlah media juga diundang untuk turut serta dalam uji jalan. Selain itu, dilakukan sosialisasi ke beberapa lokasi.

Pelaksanaan *road test* ini merupakan wujud sinergi antara berbagai lembaga Pemerintah dan industri dalam kebijakan sektor ESDM. Tak terkecuali dukungan dan keterlibatan Ditjen Migas di dalamnya yang selaras dengan tugas dan fungsi Ditjen Migas.

Beragam manfaat

Menandai rampungnya uji jalan ini, Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (28/11), menyerahkan Rekomendasi B30 kepada Menteri ESDM yang diwakili Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM FX Sutijastoto. Hadir pula dalam acara ini, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto serta instansi terkait lainnya.

Berdasarkan hasil uji teknis dinyatakan bahwa B30 siap dilaksanakan 1 Januari 2020 mendatang. Sutijastoto mengapresiasi keberhasilan B20 dan hasil uji jalan B30. Dia mengatakan, mandatori B20 yang dilaksanakan tahun 2019 telah berjalan dengan

baik. Pemanfaatan biodiesel pada program B20 mencapai 6,76 juta KL atau dapat menghemat devisa negara sebesar Rp49 triliun.

Sedangkan untuk B30 yang akan dilaksanakan 1 Januari 2020, target pemanfaatan Biodiesel mencapai 9,26 juta KL yang dapat menghemat devisa Rp69,5 triliun. Pemanfaatan Biodiesel sebesar 9,26 juta KL ini juga berarti setara dengan 20% hingga 25% impor BBM nasional.

“Ini akan memperbaiki neraca perdagangan nasional,” kata Sutijastoto.

Sementara itu, Djoko mengungkapkan, pemerintah berencana tak hanya mengimplementasikan B30 pada sektor transportasi. Menurut dia, uji coba B30 untuk kereta api dan kapal juga akan segera dilakukan. Ia menambahkan, kebijakan penggunaan B30 dipicu oleh tingginya impor solar. Padahal, Indonesia adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Sehingga, ketersediaan bahan baku kelapa sawit Indonesia sangat melimpah. Ia berharap dengan hadirnya B30, Indonesia tak lagi menjadi negara importir Solar, dan bahkan Avtur.

Penerapan B30 terbukti memiliki beragam manfaat. Salah satunya adalah meningkatnya *potential saving*. Dari tahun ke tahun, *potential saving* hasil pencampuran BBN dengan minyak Solar semakin meningkat. *Potential saving* terjadi karena penggunaan Fame telah mengurangi impor minyak Solar.

Untuk Solar *Public Service Obligation* (PSO) kurun waktu Januari sampai Agustus 2018 terdapat *potential saving* sebesar US\$952,79 juta. Selanjutnya, untuk Solar Non PSO kurun waktu September hingga Desember 2018 diperhitungkan angka

DAMPAK IMPLEMENTASI BIODIESEL (B20 & B30)			
NO	MANFAAT	NILAI MANFAAT (B20) TAHUN 2019	NILAI MANFAAT (B30) TAHUN 2020
1	Volume BBN yang digunakan	6,62 Jt kL = 41,68 Jt barel/th = 114,21 ribu barel/hari	9,6 Jt kL = 60,38 Jt Barrel/th = 165,42 ribu barel/hari
2	Penghematan devisa & pengurangan ketergantungan terhadap BBM (fosil)	3,54 Miliar USD = Rp 51,731 Triliun	5,13 Miliar USD = Rp 74,928 Triliun
3	Peningkatan nilai tambah industri hilir kelapa sawit (CPO menjadi biodiesel)	Rp 9,68 Triliun	Rp 14,02 Triliun
4	Penyerapan tenaga kerja	On farm: 828.488 pekerja Off farm: 6.252 pekerja	On farm: 1.200.000 pekerja Off farm: 9.055 pekerja
5	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) & peningkatan kualitas lingkungan	9,91 juta ton CO ₂ e = 35.908 bus kecil	14,25 juta ton CO ₂ e = 52.010 bus kecil

Asumsi:

- Perhitungan konversi emisi GRK berdasarkan data konsumsi solar bis kecil berkisar 100 liter/hari dan faktor konversi sebesar 3.172 g CO₂/kg solar
- (Asumsi Makro APBN 2019) Nilai MOPS Solar dihitung berdasarkan nilai ICP 70 USD/bbl

CHALLENGES AHEAD

- Penurunan Daya → Unjuk Kerja Daya Turun 2%
- Fuel Economy → Peningkatan Konsumsi Bahan Bakar 2,3%
- Pergantian Filter → Terjadi penyumbatan filter sehingga perlu sering dilakukan penggantian filter untuk awal pemakaian

potential saving sebesar US\$931 juta. Bahkan di tahun 2019 ini, Januari sampai Agustus untuk Solar Non PSO angka *potential saving* mencapai US\$1,89 miliar.

Mandatori B30 selain untuk meningkatkan pemanfaatan BBN, juga merupakan langkah konkret pemerintah untuk terus mengembangkan industri kelapa sawit, menyejahterakan petani kelapa sawit serta menjamin ketersediaan stabilitas harga BBM dalam negeri.

“Biosolar mampu menekan angka impor Minyak Solar. Selain itu juga mampu menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan, pun dari segi ekonomi mampu membantu perekonomian para petani sawit,” kata Djoko.

Tak hanya itu, Djoko mengajak generasi muda untuk mendukung program penggunaan B30 ini. Karena selain mengurangi beban negara dari sisi keuangan, penggunaan B30 ini juga sangat ramah lingkungan.

Upaya penggunaan B30, kata Djoko, juga merupakan komitmen Indonesia kepada dunia untuk menjaga lingkungan hidup. Tentunya, kata dia, agar dunia tetap bersih, tetap sehat. B30 juga merupakan jawaban dari Indonesia untuk mencegah terjadinya pemanasan global.

Respon positif

Pabrikan mobil dalam negeri siap menerapkan mandatori kebijakan penggunaan Biodiesel B30 yang akan berlaku tahun depan. Artinya mulai 2020, penggunaan komposisi minyak sawit pada Biosolar sudah mencapai 30% dari saat ini 20%.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Yohanes Nangoi mengatakan sejak 2018, Gaikindo sudah siap menerapkan B20 maupun B30.

“Intinya APM (agen pemegang merek) sebagian besar sudah bisa menerima. Mereka melakukan *adjustment* dan tak ada masalah,” kata Yohanes di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (20/8).

Ia mengatakan, soal rencana implementasi B30 pada tahun depan awalnya hanya ada tiga merek yang akan uji coba. Namun, telah ada tujuh merek yang melakukan tes B30. Selain itu, jenis kendaraan lebih variasi, antara lain truk, *pick up*, dan penumpang akan uji coba.

“Secara sekilas kami sampaikan asosiasi otomotif Indonesia, produsen kendaraan Indonesia, untuk kendaraan diesel secara mendasar bisa menerima rencana pemerintah untuk B30 tapi kami akan melakukan tes lanjut,” katanya.

Menyambung soal mandatori B30, pada tahapan selanjutnya para produsen bersiap pada ketentuan batas emisi Euro 4 untuk kendaraan diesel pada Maret 2021.

“Kami bangga bisa meyakinkan produsen-produsen besar kami, seperti Jepang, Eropa, Korea karena B30 adalah yang pertama dan mudah-mudahan bisa berjalan baik,” katanya.

Meski mendapat respon positif, ke depan, pelaksanaan B30 tak dipungkiri akan menemui sejumlah tantangan dan peluang. Pertama jaminan keberlanjutan *feedstock* dan stabilitas harga CPO. Dua kesiapan industri-industri penunjang seperti industri Methanol, Katalis, produksi Degum CPO/PKO. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti jetty, TBBM, kapal pengangkut yang sesuai dengan spesifikasi Fame. Ketiga mekanisme insentif yang sangat banyak, bergantung pada pungutan dan pajak keluar. Keempat sebaran BU BBN Biodiesel yang tidak merata, di mana saat ini pabrik Biodiesel lebih banyak berada di Indonesia Bagian Barat. Kelima, untuk menjaga kualitas BBN diperlukan pengetahuan *handling* dan *storing* yang sesuai standar. Keenam, adanya *negative campaign* dari beberapa negara tujuan utama ekspor mencari pasar baru. ●

Pembagian Konkrit untuk Nelayan dan Petani Sasaran Terus Meluas

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan dan petani, terus menjadi prioritas Pemerintah. Berbagai program dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan petani. Salah satunya adalah Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran atau lebih dikenal dengan pemberian paket perdana Konverter Kit (konkrit) bagi nelayan. Sama halnya dengan nelayan, kini Pemerintah juga menggulirkan program serupa bagi petani.



Paket perdana konkrit untuk nelayan di Kota Semarang.

Paket perdana konkrit untuk nelayan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.



Konsisten bergulir tiap tahunnya

Tiga tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaksanakan Program Konversi BBM ke BBG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran.

Pada tahun 2016, realisasi konversi BBM ke LPG distribusikan sebanyak 5.473 paket di 10 kabupaten/kota. Sementara tahun 2017, 17.081 paket konkrit diterima oleh para nelayan di 28 kab/kota. Tahun 2018, nelayan di 53 kab/kota menerima 25.000 paket konkrit. Kemudian, target tahun 2019 adalah 13.305 paket konkrit.

Sebanyak 13.305 paket tersebut tersebar di berbagai wilayah. Salah satu wilayah tersebut adalah Selili, Samarinda, Kalimantan Timur. Penyerahan simbolis 137 paket konkrit kepada para nelayan setempat berlangsung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Selili, Rabu (20/11). Pada kesempatan tersebut, Wakil Walikota Samarinda Muhammad Barkati, S.Sos, M.H. menyampaikan bahwa bantuan mesin dan perangkat konkrit bagi nelayan merupakan stimulan dalam rangka peningkatan produksi nelayan.

Paket perdana konkrit untuk nelayan juga diberikan kepada para nelayan Kota Semarang, Senin (2/12). Untuk Kota Semarang, pembagian paket Konkrit untuk nelayan dilaksanakan di dua lokasi titik serah, yaitu di TPI Mangunharjo sebanyak 205 paket dan Tambakmulyo sebanyak 351 paket.

Kemudian, 235 unit paket perdana konkrit untuk nelayan sasaran juga dibagikan di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Jumat (22/11). Pembagian konkrit di Bengkayang diperlukan mengingat pembangunan di wilayah tersebut masih cukup tertinggal.

Di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sebanyak 125 unit paket perdana konkrit dibagikan kepada nelayan kecil, Kamis (21/11). Pada seremoni penyerahan simbolis, Wakil Bupati Penajam Paser Utara menyampaikan terima kasih kepada kebijakan Pemerintah c.q Kementerian ESDM yang memperhatikan nelayan kecil. Bantuan Konkrit nelayan membantu ekonomi nelayan.

Lalu, sebanyak 79 paket perdana dibagikan secara gratis oleh

Pemerintah untuk nelayan Lumajang, Jawa Timur. Penyerahan bantuan tersebut secara simbolis berlangsung di ruang Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang, Rabu (20/11). Ini merupakan kali pertama mereka kebagian program yang manfaatnya dapat langsung dirasakan tersebut.

Wilayah yang terbanyak menerima bantuan konkrit untuk nelayan tahun 2019 adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan dengan 950 paket perdana. Pembagian paket perdana secara simbolis berlangsung Selasa (12/11) di Ruang Rapat Bende Siguguk I, Pemda Kabupaten OKI dan dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Wakil Ketua Komisi VII DPR Alex Noerdin, Wakil Bupati OKI M. Dja'far Shodiq, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Hasanuddin, perwakilan PT Pertamina (Persero) serta nelayan penerima paket perdana.

Sebanyak 345 nelayan di Kota Bandar Lampung juga mendapat paket konkrit. Pembagian paket perdana konkrit ini pertama kalinya ditujukan bagi nelayan Bandar Lampung. Bantuan Pemerintah ini diserahkan



Paket perdana konkit untuk nelayan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso di TPI Lempasing, Kota Bandar Lampung, Kamis (7/11).

Tak hanya untuk pertama kali, pembagian konkit untuk nelayan juga ada yang dilakukan untuk kedua kalinya, seperti di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Jumat (22/11). Setelah tahun 2018, sejumlah nelayan di wilayah tersebut kembali mendapat bantuan konkit BBG ke BBM secara gratis. Kali ini, bantuan konkit untuk nelayan Kabupaten Bone berjumlah 175 paket konkit, setelah tahun sebelumnya diterima 947 paket bantuan.

Seperti di Bone, sebanyak 580 nelayan di Kabupaten Wajo kini melaut dengan menggunakan konkit, Kamis (21/11). Ini merupakan kali kedua nelayan di Kabupaten Wajo mendapatkan bantuan tersebut.



Salah satu program diversifikasi energi adalah bagaimana mengalihkan BBM ke BBG, dalam hal ini LPG untuk sektor nelayan,”

Mohammad Hidayat
Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas

Sebelumnya pada tahun 2018, sebanyak 582 paket juga dibagikan untuk nelayan di daerah itu. Sehingga total 1.162 paket perdana dinikmati nelayan Kabupaten Wajo.

Berikutnya, hampir seribu paket konkit untuk nelayan telah dibagikan kepada nelayan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Perinciannya, 425 paket disalurkan pada tahun 2017 dan 500 paket di tahun ini. “Salah satu program diversifikasi energi adalah bagaimana mengalihkan BBM ke BBG, dalam hal ini LPG untuk sektor nelayan,” ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mohammad Hidayat dalam kesempatan penyerahan Paket Konverter Kit di Kantor Balai Diklat Pengolahan Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan Sulawesi Selatan, Rabu (20/11).

Beragam manfaat

Pembagian paket perdana Konverter Kit BBM ke LPG untuk nelayan sasaran terdiri atas beberapa komponen,

yaitu mesin penggerak, Konverter Kit, as panjang, baling-baling, 2 buah tabung LPG 3 kg, as panjang dan baling-baling, serta aksesoris pendukung lainnya (*reducer, regulator, mixer, dll*).

Adapun kriteria penerima paket konversi antara lain: 1) Memiliki kartu identitas nelayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan atau bukti lain yang diakui secara sah oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau dinas yang membidangi kelautan dan perikanan, 2) Menggunakan alat penangkapan ikan ramah lingkungan/yang tidak dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, 3) Memiliki kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 gross ton dan menggunakan mesin penggerak berbahan bakar bensin dengan daya paling besar 13 Horse Power; serta, 4) Belum pernah menerima bantuan yang sejenis dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Khusus tahun 2019 dan 2020, selain bagi nelayan kecil, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada para petani kecil. Pada tahun 2019 ini, konversi BBM ke LPG untuk petani yang dibagikan berjumlah 1.000 paket. Petani penerimanya tersebar di 4 wilayah yaitu 350 paket untuk petani Kabupaten Sragen, 350 paket bagi petani di Klaten, 50 paket untuk petani di Malang dan 250 paket bagi petani di Bantul.

Petani penerima pembagian paket perdana tersebut, harus memenuhi persyaratan yaitu pemilik lahan dengan luas lahan maksimal 0,5 hektar, untuk transmigran kurang lebih 2 hektar dengan menunjukkan dokumen kepemilikan lahan, memiliki identitas petani yang direkomendasikan oleh kepala desa/camat dan disahkan oleh kepala

daerah dan atau kepala dinas pertanian setempat serta memiliki identitas KTP, KK dan Kartu Tani.

Kriteria lainnya adalah memiliki pompa air dengan mesin penggerak lebih kecil 6,5 HP, belum pernah menerima bantuan yang sejenis, mesin pompa air yang dimiliki berbahan bakar bensin serta masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu) dinyatakan dengan surat keterangan bahwa data calon penerima bantuan masuk dalam BDT.

Paket perdana yang dibagikan ini terdiri dari mesin pompa air, konverter kit, selang hisap dan buang, 1 buah tabung LPG 3 kg, serta aksesoris pendukung lainnya (*reducer, regulator, mixer, dll*).

Pada tahun 2020, Kementerian ESDM melanjutkan pelaksanaan program Pendistribusian Paket Perdana Konverter Kit (Konkit) BBM ke LPG 3 Kg untuk para nelayan dan petani kecil.

“Sebanyak 50.000 paket Konkit akan disalurkan kepada para nelayan dan petani sasaran di tahun 2020,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta pada Senin (24/6).



Pembagian konkit untuk nelayan di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur

Penyaluran pembagian konkit LPG 3 Kg tersebut menelan biaya sebesar Rp 432,5 miliar dari APBN 2020.

Program yang merupakan bagian dari diversifikasi energi ini, memiliki makna kemudahan akses energi di mana nelayan dan petani diberikan pilihan terhadap energi yang akan digunakan. Manfaat dari LPG pun beragam, seperti lebih hemat.

Dengan menggunakan bahan bakar bensin, untuk satu kali musim tanam, misalnya, dibutuhkan biaya sekitar Rp10 juta. Namun dengan menggunakan LPG 3 kg, biaya bahan bakar hanya sekitar Rp6 juta.

Soal hemat ini diakui oleh Saiman (47), petani dari Desa Miri, Sragen. Untuk sekali mengaliri lahan sawah, dibutuhkan sekitar 10 liter bensin yang rata-rata harganya Rp7.000 per liter. Sementara jika menggunakan LPG 3 kg, untuk sekali penyiraman hanya membutuhkan 1 tabung seharga Rp17.000–20.000 per tabung.

“Hematnya banyak. Dengan adanya konverter kit untuk mesin pompa air ini sangat membantu kami. Alhamdulillah,” tuturnya.

Petani lainnya, yaitu Salaman dari Desa Mirirejo, juga mengaku





Pembagian konkit untuk petani di Sragen.

sangat senang mendapat paket konversi ini karena mengurangi biaya operasionalnya. Mengingat saat ini petani penerima paket perdana masih terbatas jumlahnya, dia mengharapkan agar tahun mendatang rekan-rekannya yang lain juga mendapat kesempatan serupa.

“Semoga Pemerintah tahun depan membagikan lebih banyak, agar teman-teman kami juga kebagian,” tambahnya.

Manfaat konkit juga dirasakan oleh Naslih (53), warga Desa Bulurejo, Lumajang. Ia merupakan salah satu nelayan penerima paket perdana konkit di Lumajang belum lama ini. Dia senang karena terpilih dari puluhan nelayan lain di kelompoknya.

“Belum semua di kelompok kami bisa menerima paket ini. Semoga program ini berkelanjutan, jadi semua nelayan bisa menerimanya,” harapnya.

Nelayan yang sudah melaut puluhan tahun ini mengaku belum

banyak mendengar tentang konkit berbahan bakar LPG yang akan dibagikan Pemerintah. Namun, berdasarkan info yang diterimanya, biaya operasional melaut akan lebih hemat.

“Kami kan tinggal di daerah terpencil. Jadi tak tahu kalau di daerah lain sudah ada yang menerima paket ini. Infonya akan lebih hemat kalau kita melaut pakai LPG. Kami senang, *alhamdulillah* kebagian (paket),” tukasnya.

Menurut Naslih, selama ini dia menggunakan BBM untuk melaut. Biaya operasional yang dibutuhkan untuk sekali melaut sekitar Rp100.000 untuk membeli 10 liter bensin.

“Kalau melautnya sampai sore, butuh 10 liter bensin. Berangkat jam 5 pagi. Kami itu melaut lihat musimnya. Kalau musimnya sampai sore, ya pulang sore dan butuh banyak bensin. Dengan pakai LPG, katanya butuh satu tabung. Harganya kalau di kampung bisa sampai Rp20.000,” tuturnya.

Dalam sebulan, Naslih dan teman-temannya melaut sekitar 15 hari. Gelombang laut yang besar, kerap kali menjadi kendala mereka untuk mencari nafkah di laut. Karena itulah, pendapatan mereka tidak pasti. Selama musim menganggur, sebagian beralih profesi menjadi buruh tani.

Hal senada juga diungkapkan Sumarji (45), Ketua Kelompok Nelayan Putera Samudra, Lumajang.

“Baru sekarang ini kami bisa melaut lagi. Bulan-bulan lalu, kami tidak bisa melaut karena ombaknya besar. Pokoknya kalau gelombangnya enak, ya kita melaut. Kalau tidak, ya menganggur. Dalam sebulan, bisa melaut 15–20 hari itu sudah bagus,” ungkapnya.

Pendapatan yang tidak pasti tersebut, membuat para nelayan merasa gembira dengan adanya Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran.

“Uang operasional akan lebih hemat. Kami bisa menyimpan uang untuk kebutuhan lainnya,” kata Sumarji.

Program ini juga dinilai sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap para nelayan kecil. Diharapkan program dapat berlanjut tahun depan, agar lebih banyak nelayan yang menikmatinya.

“Kami berterima kasih dengan adanya program Kementerian ESDM ini. Semoga program ini bisa menjadikan kelompok nelayan lebih berkembang dan lebih banyak lagi teman-teman kami yang berkesempatan menerima paket ini,” lanjut Sumarji.

Manfaat LPG lainnya adalah emisi gas buang yang rendah yang akan membuat penurunan tingkat pencemaran lingkungan secara signifikan. Hal ini diakui oleh Anggota Komisi VII DPR Andi Yuliani Paris. Di kesempatan terpisah, ia menyatakan dukungannya terhadap program ini. Selain bertujuan mensejahterakan nelayan, penggunaan konkit berbahan bakar LPG juga ramah lingkungan.

“Mesin nelayan ini pakai gas karena energi ini lebih bersih dibanding premium dan solar. Dengan LPG, kita harapkan ekosistem di laut dapat tetap lestari, nelayan juga dapat menangkap ikan dengan hasil yang baik,” tutur dia.

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) mengundang 43 Pemerintah/ Kabupaten Kota yang menjadi target sasaran program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan dan Petani. Koordinasi ini dilakukan di Malang, Rabu (16/10).

Djoko Siswanto menegaskan dukungan Pemda sangat diperlukan demi mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Konversi BBM ke LPG untuk nelayan dan petani sasaran. Terkait hal ini, Ditjen Migas mengundang 43 Pemerintah/ Kabupaten Kota yang menjadi target sasaran program Konversi BBM ke BGG untuk Nelayan dan Petani. Koordinasi ini dilakukan di Malang, Jawa Timur, Rabu (16/10).

Selain itu, untuk mengoptimalkan program ini ke depan, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo menyampaikan, diperlukan sinergi antara data pusat dan daerah.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Walikota Samarinda Muhammad Barkati. Ia berharap, koordinasi data antara pusat dan daerah agar tetap baik.

“Negara kita adalah negara yang sangat peduli pada masyarakat, hanya data yang susah,” ungkapnya.

Peresmian Gedung Ibnu Sutowo, “Kita Banyak Belajar dari Beliau”

Pagi itu suasana Gedung Migas tampak sedikit berbeda. Tenda merah putih menjuntai dari atap lobi, memayungi segenap pimpinan dan staf Ditjen Migas yang berkumpul di teras lobi. Berbalut pakaian batik, baik peserta maupun tamu undangan tampak antusias menantikan momen peresmian Gedung Migas menjadi Gedung Ibnu Sutowo (15/10).



Disaksikan para pejabat serta segenap tamu undangan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peresmian gedung ditandai dengan penekanan sirine secara bersama-sama, oleh Plt. Direktur Jenderal Migas dan putra-putri Ibnu Sutowo yakni Pontjo Nugro Susilo, dr. Sri Hartati, Endang Utari, dan Handara.

“Kita semua merasa bangga, bahwa Gedung Ditjen Migas mendapat nama besar yaitu Gedung Ibnu Sutowo,” ungkap Plt. Dirjen Migas, Djoko Siswanto dalam sambutannya.

Penamaan gedung Ibnu Sutowo ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 46 K/93/ MEM/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penetapan Nama Gedung Kantor di Lingkungan Kementerian ESDM. Sebagaimana dilaporkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Migas, Iwan Prasetya Adhi bahwa Keputusan Menteri ini bertujuan untuk penataan dan ketertiban nama gedung kantor, pemberian identitas gedung, serta sebagai wujud penghargaan dan penghormatan kepada para tokoh-tokoh bangsa di sektor ESDM.



Dalam sambutannya, Djoko kembali mengingatkan peran Ibnu Sutowo dalam membangun industri Migas di tanah Air, khususnya penerapan konsep *Production Sharing Contract* (PSC) pada industri Hulu Migas.

“Saya dulu kuliah S2 di Inggris membaca banyak buku soal PSC, ternyata pendirinya adalah pak Ibnu Sutowo. Sekarang PSC ini dipakai di seluruh dunia digunakan untuk kontrak dalam usaha hulu migas. Kami banyak belajar dari Pak Ibnu Sutowo.” Imbuh Joko.

Konsep pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Ibnu Sutowo dilandaskan pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (3), bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Djoko, dalam pemikiran Pak Ibnu, bahwa SDA tidak boleh dimiliki oleh asing dan tetap dimiliki oleh negara bangsa ini. Lalu karena pada saat itu (pasca kemerdekaan), Indonesia belum memiliki uang dan teknologi, maka Pemerintah mengundang investor

untuk membantu mengelola SDA. Biaya pengelolaan SDA ditanggung sepenuhnya oleh Investor atau kontraktor, dan hasilnya dibagi dua antara Pemerintah dengan kontraktor.

Dalam perkembangannya, PSC mengalami beberapa masa generasi, dan saat ini merupakan PSC generasi keenam atau dikenal sebagai PSC *Gross Split*.

“*Alhamdulillah*, kita kembali kepada PSC yang pertama kali diciptakan oleh Bapak Ibnu Sutowo, yaitu produksi langsung dibagi 2 antara kontraktor dan negara, yakni PSC kontrak *gross split*,” lanjut Djoko.

Pada momen tersebut, salah satu putra Ibu Sutowo yakni Pontjo Nugro Susilo juga mengucapkan terimakasih atas penamaan Gedung Ibnu Sutowo, “Kami mengucapkan terimakasih karena ini merupakan penghargaan bagi almarhum Ayah, dinyatakan sebagai tokoh dari Migas.”



Pontjo berharap agar filosofi Ibnu Sutowo ada di masyarakat. Menurut Pontjo, Filosofi tersebut bisa merubah kondisi bangsa, khususnya di lingkungan ESDM.

“Karena di lingkungan ESDM harapan dan tantangan masih besar. Dengan potensi kekayaan alam yang luar biasa, tetapi tantangan juga kita rasakan,” ungkap Pontjo, “Ayah (Ibnu Sutowo) saya selalu mengatakan bahwa kita harus percaya pada diri sendiri karena setiap orang terlahir memiliki kecerdasan yang sama,” imbuhnya.

Mimpi dan harapan Ibnu Sutowo akan kemandirian dan penguasaan industri Migas di Indonesia perlahan menemui jalan terang. Di bawah kepemimpinan Ignasius Jonan, beberapa blok Migas seperti blok migas Mahakam, blok migas Rokan, blok Migas Sanga-sanga, dan blok-blok lain kini mampu dikelola anak negeri. ●

Sembari menyampaikan buku biografi Ibnu Sutowo, Pontjo juga mengingatkan filosofi yang selalu dipakai oleh Ibnu Sutowo bahwa “Celakalah orang Kaya tapi Bodoh, karena akhirnya dia akan dikalahkan oleh orang pintar.”

Profil Ibnu Sutowo



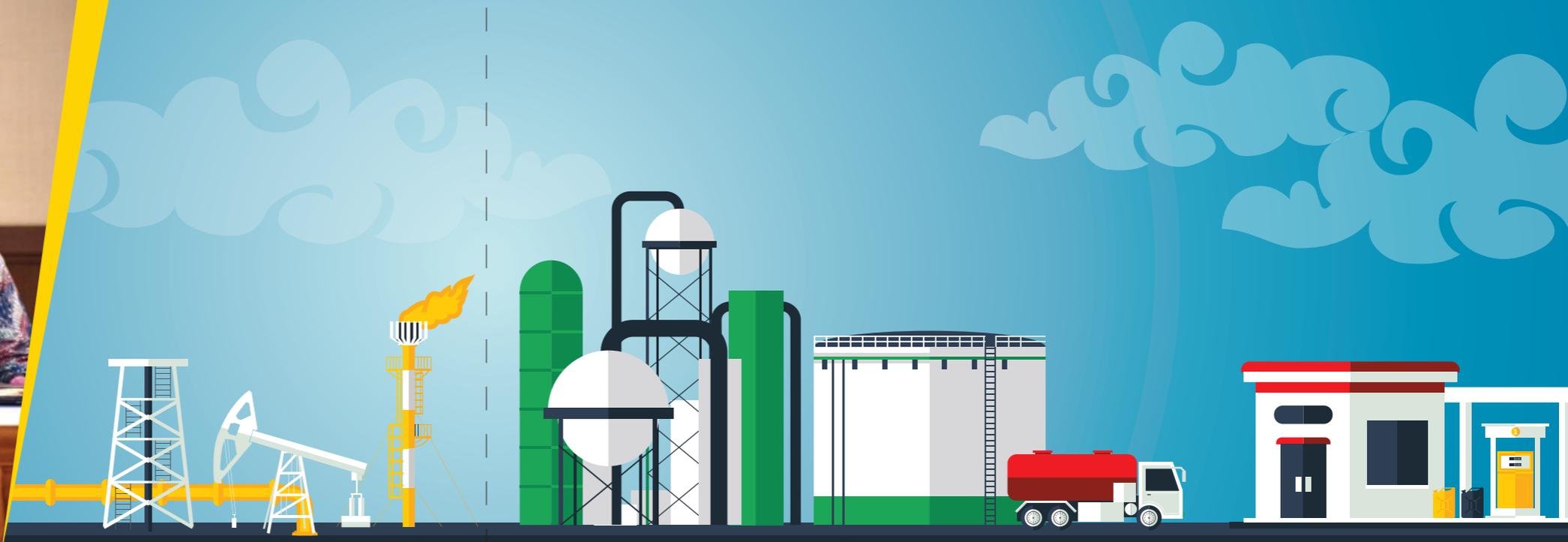
Profesor Dr. H. Ibnu Sutowo, D.Sc., lahir di Grobogan, Jawa Tengah, 23 September 1914 dan tutup usia di Jakarta, 12 Januari 2001 pada usia 86 tahun. Menikah dengan Zaleha atau yang kerap dipanggil Saly, tanggal 12 Desember 1943 di Martapura, Palembang, pasangan ini dikaruniai 7

orang anak, terdiri dari 2 Laki-laki dan 5 Perempuan. Ibnu Sutowo adalah Menteri Minyak dan Gas Bumi (saat ini dikenal dengan Menteri ESDM) pada Kabinet Dwikora II dan Dwikora III (21 Februari 1966 – 25 Juli 1966). Dia merupakan Menteri Minyak dan Gas Bumi ketiga, setelah Chaerul Saleh dan Armunanto.

Selanjutnya Ibnu dipercaya sebagai Direktur Jenderal Minyak Gas & Bumi di Departemen Pertambangan pada Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II serta Kabinet Pembangunan I merangkap Penasihat Presiden RI Bidang Industri/Pembangunan (25 Juli 1966 – 6 Juni 1968). Sejak muda, Ibnu telah tertarik pada dunia perminyakan dengan kerap membaca buku mengenai migas, disela-sela profesinya sebagai dokter. Dalam

suasana negara belum pulih akibat perang, Ibnu membantu Pemerintah membangun kembali tambang-tambang minyak dan mengubahnya menjadi salah satu sumber yang penting bagi bangsa Indonesia. Kontrak kerja sama bagi hasil migas pertama yang ditandatangani 1966 antara Pertamina dan Independen Indonesia American Petroleum Company (IIAPCO), merupakan salah satu hasil pemikiran Bung Karno, Bung Hatta dan Ibnu Sutowo.

Karirnya di dunia migas juga membawa Jenderal bintang tiga ini menjadi Gubernur OPEC (1965) dan berhasil memperbesar saham Pemerintah Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas SDM bidang migas, Ibnu juga mendirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi di Bandung (1963) dan Pusat Pendidikan Minyak di Cepu (1966).



Dikaji Ulang, Skema *Cost Recovery* Dapat Menambahkan Opsi Investasi

Untuk meningkatkan investasi di hulu minyak dan gas bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewacanakan untuk kembali membuka sistem kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi atau *cost recovery* bagi wilayah kerja baru dan terminasi. Skema *cost recovery* akan menjadi opsi bersama sistem fiskal *gross split* bagi investor migas.

Masing-masing memiliki kelebihan

Gross split mengatur agar biaya operasi menjadi beban kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan KKKS diperhitungkan di muka.

Sementara itu, *cost recovery* memiliki ketentuan agar biaya operasi awalnya dikeluarkan oleh KKKS. Tapi, akhirnya menjadi tanggungan

pemerintah. Fleksibilitas dalam skema investasi tersebut ditargetkan dapat menjadi sinyal positif untuk meningkatkan investasi hulu migas di Indonesia.

“Kami melakukan dialog dengan para investor di bidang migas. Kami tanyakan, mana yang *prefer*, ada dua (*gross split* dan *cost recovery*),” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan resminya, Sabtu (30/11).

Opsi fleksibilitas skema investasi antara *gross split* dan *cost recovery* ini sebelumnya pernah disampaikan Arifin dalam rapat kerja dengan anggota Komisi VII DPR RI, Rabu (27/11). Arifin mengungkapkan, perlu ada evaluasi terhadap pola bisnis serta investasi di sektor migas.

Menurut Arifin, kedua skema fiskal tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada investor yang lebih memilih skema kontrak *cost recovery* untuk lapangan yang terletak di daerah sulit dan berisiko tinggi karena skema tersebut dinilai lebih rasional.

“Semakin risk dan daerah *remote*, mereka pilih PSC (*cost recovery*). Komponen PSC itu bisa *reasonable*. Itu kami sudah pengalaman PSC. Meski PSC juga ada satu keluhan, tiap tahun perlu di-*review* dan prosesnya lama,” jelasnya.

Pemerintah mewajibkan perusahaan migas menerapkan skema *gross split* di wilayah kerja baru dan terminasi sejak 1 Januari 2017. Hingga saat ini, sudah ada 45 WK migas yang menggunakan skema tersebut, yakni 17 WK hasil lelang, 23 WK terminasi dan 5 WK amandemen.

Dari jumlah tersebut, pemerintah memperoleh dana eksplorasi sebesar

US\$2,71 miliar atau sekitar Rp40,7 triliun. Sementara untuk bonus tanda tangan sebesar US\$1,19 miliar atau sekitar Rp17,8 miliar.

Skema *gross split* dianggap lebih cocok untuk wilayah kerja eksisting karena memiliki tingkat kepastian bisnis yang lebih tinggi.

“Kalau *gross split* kan mereka senang, terutama *existing field* karena sumbernya sudah jelas, potensi jelas, dan *risk*-nya kurang,” ungkap Arifin.

Menteri ESDM Arifin menyatakan pertimbangan kembali penerapan *cost recovery* berkaitan dengan upaya pemerintah menarik minat lebih banyak investor migas sehingga perlu opsi yang cukup fleksibel. Hal ini dinilai sejalan dengan arahan presiden Joko Widodo untuk memetakan regulasi penghambat investasi.

Menyambut baik

Di tempat terpisah, Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) Hilmi Panigoro buka suara soal adanya opsi fleksibilitas dalam skema kontrak migas. Ia menyambut baik rencana tersebut. Menurut Hilmi, sektor hulu migas memerlukan fleksibilitas bentuk kontrak yang dapat memberikan keekonomian yang menarik guna mendorong investasi.

“Kami menyambut baik gagasan tersebut. Keekonomian yang menarik akan mendorong investasi migas baik eksplorasi, produksi maupun EOR (*Enhanced Oil Recovery*),” katanya belum lama ini.

Hilmi bahkan menyarankan agar pemerintah bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bisa membuat gugus tugas khusus untuk merancang bentuk dan kondisi fiskal kontrak, agar bisa bersaing secara kompetitif dengan negara lain.

Saya sarankan Kementerian/SKK Migas membuat gugus tugas khusus untuk *design* bentuk dan kondisi fiskal kontrak, yang paling tidak setara dengan 10% kontrak-kontrak migas terbaik di dunia. Menarik investasi adalah proses kompetisi,” terang Hilmi.

Sebelumnya, pendiri Medco Group Arifin Panigoro pernah menyoroti skema kontrak bagi hasil *gross split* yang dinilai kurang mendorong iklim investasi.

Menurut Arifin, transisi skema *cost recovery* ke skema *gross split* perlu dievaluasi. Evaluasi dirasa perlu sebab jika tidak ada langkah konkret, akan sulit untuk menarik minat investor.

“Ini kan idenya untuk simplifikasi tapi realisasinya di lapangan kan unik. Jika kita diam saja bagaimana orang tertarik, dibahas saja lagi sekarang yang ada seperti apa,” kata Arifin dalam sarasehan Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (APERMIGAS) ke-2 di Jakarta, Kamis (10/10).

Terbuka terhadap masukan

Demi memacu gairah investasi kegiatan usaha hulu migas, Ditjen Migas terbuka atas masukan dari para pelaku industri migas.

“Apabila ada kendala atau hambatan silahkan disampaikan, nanti Pemerintah segera menyesuaikan,” ungkap Plt Direktur Migas Djoko Siswanto dalam acara Pertamina *Energy Forum* (PEF) 2019 beberapa waktu lalu.

Menurut Djoko, penggunaan kontrak *gross split* ini adalah untuk memenuhi permintaan investor. Namun demikian, pada kesempatan

tersebut Djoko juga menyampaikan pesan Menteri ESDM bahwa ke depan investor bebas memilih untuk menggunakan kontrak bagi hasil dengan *cost recovery* atau *gross split*.

Menurut Djoko, pengelolaan energi saat ini memasuki paradigma baru, di mana energi tak lagi menjadi komoditas, tetapi sebagai modal pembangunan nasional, di antaranya melalui pembangunan ekonomi, penciptaan nilai tambah di dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja.

Dalam kebijakan bauran energi, peran migas masih menjadi andalan utama. Untuk tahun 2018 prosentase minyak sebesar 38,81%, disusul batu bara sebesar 32,97%, gas bumi sebesar 19,67%, dan energi baru sebesar 8,55%.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik tersebut, pemerintah lakukan beberapa inovasi untuk menarik investasi migas. Pertama,

reformasi regulasi dan dengan penyederhanaan peraturan dan perizinan.

“Semua peraturan yang menghambat investasi harus dicabut, kemudian disederhanakan proses perizinan dan birokrasi. Semangat dari pimpinan agar investasi terus meningkat, termasuk eksploitasi,” tegas Djoko.

Sebelum penyederhanaan, terdapat 104 perizinan dan rekomendasi untuk kegiatan usaha migas. Reformasi dilakukan dengan penyederhanaan perizinan pada 2016, di mana perizinan migas dipangkas menjadi 42 perizinan. Selanjutnya, pemerintah kembali menyederhanakan perizinan menjadi hanya 6 perizinan pada tahun 2017.

Selain penyederhanaan, pengajuannya izin migas semakin mudah dengan sistem *online single submission* (OSS) melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0. ●

Urus SKUP Kini Tak Lagi Ribet

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki iklim investasi. Salah satunya melalui pemangkasan perizinan. Sebanyak 186 perizinan telah dipangkas, termasuk pengurusan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) jasa penunjang di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang jumlahnya sekitar 1.800 hingga 2.000 pengajuan per tahun.



Masih terkait perbaikan iklim investasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas. Dengan aturan ini, pengurusan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) Migas menjadi lebih cepat, transparan dan akuntabel melalui sistem *online*.

Dapat diurus sendiri

Dalam pengurusan SKUP secara *online* tersebut, Pemerintah mengharapkan badan usaha dapat mengurus sendiri surat yang diperlukannya dan tidak lagi menggunakan pihak ketiga. Apabila terjadi kesulitan, badan





usaha dapat langsung menghubungi unit terkait di Ditjen Migas.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP) yang merupakan sebuah dokumen atau bukti pengakuan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Namun, SKUP bukanlah pengganti SKT dan bukan pula instrumen wajib sebagai persyaratan mengikuti lelang (tender).

“Hari ini kita mengumpulkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan vendor untuk menjelaskan bahwa SKT Migas sudah lama dihapus, tetapi kelihatannya pelaku di industri belum merasakan bahwa SKT ini sudah dihapus,” ujar Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/7).

Kegiatan usaha migas di Indonesia, lanjut Arcandra, harus dapat menciptakan efek berganda, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas nasional. Arcandra mengungkapkan, pembinaan terhadap kemampuan produsen dalam negeri melalui penerbitan SKUP Migas saat ini telah tersedia secara daring dan tidak dipungut biaya. Menurut Arcandra, pelayanan harus dimudahkan agar investor datang untuk menanamkan modalnya di dalam negeri. Saat ini, kata dia, sudah lebih dari 200 perusahaan yang terdaftar dalam SKUP.

“Tujuan dihapuskannya SKT untuk mempermudah rantai bisnis di jasa penunjang migas sehingga usaha-usaha baik itu kecil, menengah dan besar yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan penunjang migas itu bisa langsung berinteraksi dengan KKKS

tanpa lagi memerlukan SKT,” lanjut Arcandra.

Arcandra menyebutkan, penerbitan SKUP untuk memberikan apresiasi bagi badan usaha yang memiliki kemampuan nyata meliputi aspek legal, teknis, jaringan pemasaran dan purna jual, bukan merupakan instrumen wajib untuk persyaratan lelang dalam PTK SKK Migas Nomor 007 (PTK Pengadaan Barang dan Jasa).

“SKUP tidak dipersyaratkan sebagai persyaratan lelang. SKUP ini diberikan lebih kepada kemampuan perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai produk di dalam negeri dan untuk itu mereka diberi bintang satu, dua, tiga dan seterusnya sehingga kontraktor bisa melihat apakah mereka punya lokal konten yang memadai,” kata Arcandra.

Menihilkan biaya tak perlu

“Jangan menggunakan pihak ketiga. Kita harus punya komitmen bersama mewujudkan *good governance*. Biaya-biaya yang tidak perlu akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi, nanti investor takut. Lebih baik duitnya dipakai untuk meningkatkan kompetensi perusahaan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha migas yang efektif dan efisien. Itu misi Pemerintah yang harus berhasil,” tegas Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih di Gedung Ibnu Sutowo, Rabu (3/7), dalam acara Sosialisasi Permohonan SKUP *Online*.

Soerja melanjutkan, saat ini masih terdapat badan usaha yang belum berhasil mendapatkan SKUP karena berbagai alasan. Terkait hal tersebut, Pemerintah berkomitmen membantu mempermudah badan usaha mendapatkan layanan SKUP, sehingga kemampuan perusahaan yang telah memiliki kompetensi, dapat dipromosikan melalui penerbitan buku APDN (Apresiasi Produk Dalam Negeri) sebagai acuan dalam pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas.

“Buat Pemerintah, kalau kegiatan usaha lancar sudah senang. Kenapa? Karena ada lapangan kerja, pajak yang dibayar kepada negara. Kalau ada yang mempersulit lapor ke saya. Saya akan sediakan kotak pos silahkan masukan keluhan dan saran Anda,” tegasnya lagi.

Sosialisasi Permohonan SKUP *Online* merupakan upaya Ditjen Migas dalam membantu perusahaan dan perseorangan yang telah memenuhi seluruh persyaratan namun mengalami kesulitan dalam proses aplikasi SKUP secara *online*. Pertemuan semacam ini akan dilakukan secara berkala agar badan usaha tidak mencari alternatif lain atau meminta bantuan pihak lain.

Penerbitan SKUP Migas diperuntukkan bagi kegiatan inti migas. SKUP Migas diklasifikasikan menjadi 13 subbidang yang terbagi dalam 3 kelompok yaitu jasa konstruksi migas, jasa non konstruksi migas dan industri penunjang migas.

SKUP Migas merupakan sebuah dokumen/bukti pengakuan resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Ditjen Migas atas kelayakan dan kemampuan masing-masing produsen dalam negeri. Pengurusan SKUP tidak dipungut biaya.

Sinergi antara Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS dan produsen dalam negeri dalam program pembinaan produk dalam negeri dan substitusi impor diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan menciptakan produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi, mutu, dan kebutuhan operasi.

Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 tahun 2018 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Migas, pengurusan SKUP Migas menjadi lebih cepat, transparan dan akuntabel. Pengurusan SKUP Migas ini dapat diakses melalui www.skup-apdn.migas.esdm.go.id. ●





Arifin Tasrif

Jabat Menteri ESDM yang Baru

Presiden Joko Widodo telah melantik dan mengambil sumpah Arifin Tasrif sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (23/10) pagi. Ia menggantikan Ignasius Jonan yang menduduki jabatan Menteri ESDM sejak 14 Oktober 2016.



Usai pelantikan Menteri ESDM yang baru, dilakukan serah terima jabatan dari Ignasius Jonan kepada Arifin Tasrif di Ruang Sarulla, Kementerian ESDM. Kedatangan Arifin Tasrif di Gedung Kementerian ESDM, disambut hangat Ignasius Jonan dan mantan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar di Lobi Gedung Heritage. Setelah beristirahat sejenak, rombongan kemudian menuju Ruang Sarulla yang telah dipenuhi para pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan *stakeholder*. Di sepanjang jalan, mereka menyalami para pegawai yang telah berjejer menyambut kehadiran Menteri Arifin, Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar.

Arcandra Tahar berkesempatan menyampaikan sambutan pertama. Arcandra mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja sama selama ini.

"Saya berterima kasih kepada semua rekan-rekan ESDM yang sudah bekerja sama dengan baik selama kami bertugas di sini. Semoga apa yang dikerjakan menambah amal ibadah kita. Juga kepada para dunia usaha, saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya. Apa yang kami kerjakan itu adalah amanat Undang-Undang. Itu yang menurut kami sesuai dengan aturan yang ada. Kalau ada yang kurang, mohon maaf," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Arcandra juga menyampaikan selamat kepada Arifin Tasrif atas amanah barunya.

"Semoga ESDM bisa lebih maju. Insya Allah, kementerian ini jauh lebih maju dan bisa menjadi the guardian public interest," tambahnya.

Senada dengan Arcandra, Ignasius Jonan juga mengucapkan selamat kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepadanya selama memimpin Kementerian ESDM. Jonan berlega hati karena

pejabat yang menggantikannya merupakan kawan lama.

"Saya senang digantikan kawan lama. Saya kenal sudah 20 tahun lebih. Pak Tasrif tidak tambah tua. Saya kok tambah tua," kelakar Jonan. Jonan yakin Kementerian ESDM akan semakin maju di bawah kepemimpinan Arifin Tasrif yang tidak asing lagi bagi sektor ESDM. Program-program pro rakyat yang selama ini telah dijalankan, diharapkan juga tetap dilanjutkan.

Mengakhiri sambutannya, Jonan menilai ada beberapa tantangan yang harus dihadapi Kementerian ESDM serta memerlukan perhatian khusus seperti harga gas, B30 dan tarif listrik.

"Nanti ini perlu atensi sendiri supaya tidak jadi masalah kemudian hari," katanya.

Pada saat pelantikannya sebagai Menteri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo menyebutkan sejumlah hal yang mesti dilakukan oleh Arifin sebagai suksesi Ignasius Jonan. Salah

satunya merealisasikan bauran energi baru terbarukan (EBT) serta mengurangi impor migas.

"Saya kira untuk tugas, merealisasikan energi baru terbarukan, untuk mengurangi impor migas dan lain-lainnya berada di bawah beliau," ujar Presiden Jokowi pada saat pelantikan Menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).

Saat serah terima jabatan di Kementerian ESDM, Arifin pun mengungkapkan salah satu tantangan utama kementerian ESDM ke depan adalah mencari jalan keluar untuk menekan defisit neraca perdagangan.

"Kita saat ini mengalami current account deficit (CAD) perdagangan yang harus menjadi perhatian," ungkap Arifin.

Tugas lain menanti Arifin seperti melanjutkan program BBM Satu Harga di 500 lokasi, peningkatan rasio elektrifikasi 100%, dan pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. ●

PROFIL SINGKAT

Nama	: Arifin Tasrif
Tempat & Tanggal Lahir	: Jakarta, 19 Juni 1953
Pendidikan	: - SMA Yayasan Pendidikan Harapan, Medan (1968-1971) - Teknik Kimia, ITB (1971-1977)
Penghargaan	: Honorary Fellowship Award dari AFEO (ASEAN Federation of Engineering Organization) tahun 2011
Karier	: - Direktur Bisnis PT ReKayasa Industri (1995-2001) - Direktur Utama PT Petrokimia Gresik (2001-2010) - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Holding Company (2010-2015) - Duta Besar Indonesia untuk Jepang (2017-2019)
Riwayat Organisasi	: - Dewan Penyantun Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (2014-2018) - Wakil Ketua Umum III Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (2010-2014)

Strategi Menggairahkan Investasi Migas

Pemerintah c.q. Ditjen Migas terus berupaya memacu gairah investasi kegiatan hulu migas. Berbagai langkah strategis pun dilakoni. Pun, Pemerintah terbuka atas masukan dari para pelaku industri migas.



“Apabila ada kendala atau hambatan silahkan disampaikan, nanti Pemerintah segera menyesuaikan,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Migas Djoko Siswanto dalam acara Pertamina Energy Forum (PEF) 2019 beberapa waktu lalu.

Menurut Djoko pengelolaan energi saat ini memasuki paradigma baru, dimana energi tak lagi menjadi komoditas tetapi sebagai modal pembangunan Nasional, diantaranya melalui pembangunan ekonomi, penciptaan nilai tambah di dalam negeri, serta penyerapan tenaga kerja.

Empat terobosan

Dalam kebijakan bauran energi, peran migas masih menjadi andalan utama. Untuk tahun 2018 prosentase minyak sebesar 38,81 persen, disusul batu bara sebesar 32,97 persen, gas bumi sebesar 19,67 persen, dan energi baru sebesar 8,55 persen.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik tersebut, Pemerintah melakukan beberapa inovasi untuk menarik investasi migas. Pertama, reformasi regulasi dan dengan penyederhanaan peraturan dan perizinan.

“Semua peraturan yang menghambat investasi harus dicabut, kemudian

disederhanakan proses perizinan dan birokrasi. Semangat dari pimpinan agar investasi terus meningkat, termasuk eksploitasi,” tambah Djoko.

Sebelum penyederhanaan, terdapat 104 perizinan dan rekomendasi untuk kegiatan usaha migas. Reformasi dilakukan dengan penyederhanaan perizinan pada 2016, dimana perizinan migas dipangkas menjadi 42 perizinan. Selanjutnya, Pemerintah kembali menyederhanakan perizinan menjadi hanya 6 perizinan pada tahun 2017.

Selain penyederhanaan, pengajuannya izin migas semakin mudah dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) melalui Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM). Hal ini sesuai dengan tuntutan revolusi industri 4.0.

Kedua, dari sisi kontrak kerja sama migas, Pemerintah juga berinovasi dengan menerapkan sistem kontrak bagi hasil dengan skema *Gross Split*.

Hingga 1 September 2019, total sebanyak 45 wilayah kerja (WK) migas menggunakan skema kontrak *Gross Split*, di mana 17 WK di antaranya melalui tender, 23 WK terminasi, dan untuk amandemen terdapat 5 WK.

“Untuk *Gross Split*, berapapun split bagian kontraktor yang dibutuhkan, Menteri dapat memberikan. Sedangkan signature bonus sendiri dihitung setor ke kas negara Rp21 triliun, ini hasil dari *Gross Split*,” kata Djoko.

Djoko menambahkan, bahwa sebagian dana tersebut, yakni USD400 juta digunakan oleh Pertamina untuk melakukan kegiatan eksplorasi seismik di seluruh wilayah perairan Indonesia. Ia berharap, dengan kegiatan tersebut dapat ditemukan identifikasi cadangan migas yang baru.

Ketiga, pemberian insentif pajak pada skema kontrak *Gross Split*.

“Untuk *Gross Split* ada beberapa tax yang lebih baik dari *Cost Recovery* yang kita berikan kepada investor, seperti import duty free, luxury goods VAT, hingga income tax, ada lost carry forward sampai 10 tahun, bahkan untuk eksplorasi juga sudah

”

Untuk *Gross Split*, berapapun split bagian kontraktor yang dibutuhkan, Menteri dapat memberikan. Sedangkan signature bonus sendiri dihitung setor ke kas negara Rp21 triliun, ini hasil dari *Gross Split*.”

Djoko Siswanto

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

dibebaskan dan PBB juga bebas,” jelas Djoko.

Keempat, keterbukaan Data Potensi migas. Jika dahulu data potensi migas bersifat rahasia, maka sejak diterapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, maka data mengenai pengelolaan dan pemanfaatan migas dibuka aksesnya untuk umum.

“Ke depan, data kita terbuka untuk umum, melihat cadangan migas di Indonesia, kalau tertarik silahkan datang dan eksplor,” kata Djoko.

Dalam waktu dekat, Pemerintah juga akan menentukan besaran iuran keanggotaan untuk memperoleh data tersebut.

“Tidak usah mahal-mahal, tujuannya bukan untuk memperoleh uangnya tetapi investasinya bisa masuk ke Indonesia,” ujar Djoko.

Fiskal impor barang Menurut Djoko, penggunaan kontrak *Gross Split* ini adalah untuk memenuhi permintaan investor. Namun demikian, pada kesempatan tersebut Djoko juga menyampaikan pesan Menteri ESDM bahwa ke depan investor bebas memilih untuk menggunakan kontrak bagi hasil dengan *Cost Recovery* atau *Gross Split*.

Selain itu, Pemerintah juga menyediakan fasilitas fiskal

impor barang. Untuk efisiensi dan percepatan evaluasi pemberian fasilitas tersebut, Ditjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas (KKKS) akan duduk bersama dan bersinergi untuk kegiatan Pra Masterlist.

“Tujuannya untuk mempercepat layanan pengajuan impor dan bimbingan konsultasi. Saat Pra Masterlist akan dibahas dan diputuskan secara detail dan rinci mengenai kebutuhan barang yang akan diimpor mulai dari spesifikasi teknis, jumlah barang yang dibutuhkan sampai dengan tujuan penggunaan barang,” demikian disampaikan Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Soerjaningsih, pada acara Sosialisasi Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Pra Masterlist, Kamis (28/11) di Gedung Ibnu Sutowo.

Hasil Pra Masterlist selanjutnya akan digunakan oleh KKKS sebagai acuan dalam pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI). Pra Masterlist juga menjadi pegangan SKK Migas dan Ditjen Migas dalam mengevaluasi RKBI yang diajukan KKKS, sehingga penolakan pengajuan RKBI yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas tidak terjadi.

“Yang terpenting adalah perencanaan dari KKKS, serta alasan kebutuhan impor dibuktikan dengan data yang akuntabel, tegas Soerjaningsih. “Awal Desember ini akan dibentuk Tim khusus antara Ditjen Migas dengan SKK Migas untuk kegiatan Pra Masterlist,” imbuhnya.

Selain itu, para peserta sosialisasi juga diingatkan agar dalam menyusun perencanaan impor barang wajib mengutamakan produk dalam negeri yang mengacu pada Buku Apresiasi Produk Dalam Negeri (APDN), sesuai ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.

17 Tahun 2018 tentang Impor Barang Operasi Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Di sisi lain, untuk penguatan produk dalam negeri, Soerjaningsih juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman agar melakukan pembinaan kepada para pengusaha dalam negeri agar lebih efisien dan meningkatkan profesionalitas.

“Saya bicara ke Kemenperin dan Menko Maritim bahwa produk dalam negeri juga harus memiliki komitmen terhadap kualitas dan harga. *Rule of the game* harus ada dan disepakati,” ungkap Soerja.

Pada kesempatan yang sama George N.M., Kepala Departemen Logistik dan Kepabeanaan SKK Migas menyampaikan bahwa hingga saat ini telah dilakukan kegiatan 15 Pra *Masterlist* dengan 9 KKKS, dengan total 8.000 *items* yang akan diimpor, dimana yang tidak disetujui 48 persen dan disetujui 52 persen.

George mengungkapkan alasan penolakan antara lain: pertama, karena barang sudah ada di APDN, kedua barang operasi *sole agent* atau *warranty* dimana *spare part*-nya bisa diproduksi di dalam negeri, ketiga data dan informasi spesifikasi barang operasi yang akan diimpor kurang jelas, keempat kenyamanan dari *user* (KKKS) untuk memakai produk impor, kelima kebutuhan spesifikasi barang operasi antara KKKS pada satu sumur yang sama bisa berbeda.

Dari sisi pengusaha, KKKS merasakan manfaat adanya kegiatan Pra *Masterlist*, karena membantu KKKS untuk mengevaluasi perencanaan kegiatan operasionalnya. Hal ini sejalan dengan misi perusahaan untuk melakukan efisiensi.

Pertamina Hulu Mahakan (PHM) misalnya, telah dilakukan 3 kali



kegiatan Pra *Masterlist* dan dari 700 *line items* barang yang diajukan, PHM telah mereduksi menjadi 100 *line items* barang untuk diajukan impor.

“Di manajemen PHM, pembiayaan impor semua material harus ada justifikasi dan validasi. Aturan *top down* sudah *clear*, tidak ada pembelian barang impor tanpa ada *masterlist*. Dan ini bagian dari kewajiban kami untuk efisiensi perusahaan,” ungkap Agus Suprijanto, *Vice President Authorization Coordination, Communication and External Affair* PHM.

Seperti disampaikan Agus bahwa PHM memiliki *road map* tersendiri untuk perencanaan kebutuhan barang operasional dengan mempertimbangkan *Nasional Capacity Building*, untuk meningkatkan kemampuan industri lokal.

Hal senada juga diungkapkan Toto Kiryoto, *Reliability Spareparts Specialist* BP Indonesia.

“Setelah kemarin diskusi dengan Ditjen Migas, lalu kami evaluasi dan pendalaman lagi (pengajuan impor). Ternyata kita bisa, bahkan hampir 100 persen untuk filterisasi kita sudah tarik dari impor (tidak impor). Jadi kalau BP

bisa pakai kenapa KKKS lain tidak bisa pakai,” ungkap Toto.

Manajemen BP Indonesia sangat setuju dengan penguatan APDN dalam Pra *Masterlist*, karenanya harus ada persepsi yang sama untuk *adjustment* pengajuan rencana impor barang operasi.

“Makin ke sini kami akan *improve* bahwa yang benar-benar kita impor adalah *main engine*, yang tidak bisa diproduksi di Indonesia.” pungkask Toto.

Indonesian Petroleum Association (IPA) yang saat itu diwakili oleh Fery Sarjana, *Chairman Komite SCM* juga mengungkapkan bahwa sinergi inilah sebenarnya yang diinginkan oleh KKKS, melalui Pra *Masterlist* bisa dilakukan persamaan persepsi dalam rencana pengajuan impor barang.

“Sinergi inilah yang kami inginkan, kami sangat mengapresiasi langkah Pemerintah. Ke depan KKS menghadapi tantangan untuk perencanaan yang matang akan kebutuhan kegiatan operasional hulu migas. Kedua, soal komitmen KKS menggunakan produk dalam negeri dan, ketiga ketersediaan produk dalam negeri itu sendiri,” pungkask Fery. ●

Siap Membangun 4,7 Juta Sambungan Jaringan Gas Bumi



Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Pemerintah mencanangkan target untuk membangun 4,7 juta sambungan rumah (SR) jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) sampai dengan tahun 2025. Jaringan gas yang melewati dan tepat berhenti di rumah-rumah penduduk tersebut direncanakan akan menjadi pilihan lain dari keberadaan tabung *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg yang selama ini digunakan sebagian besar masyarakat untuk kegiatan di dapur.

Telah dimulai sejak tahun 2019 Infrastruktur gas tersebut sampai dengan sekarang. Pipa-pipa gas tersebut direncanakan hingga akhir tahun ini dapat terbangun 325.852 SR yang pembangunannya bersumber dari APBN. Dari tahun ke tahun, pembangunan jargas relatif meningkat dari segi kuantitas.

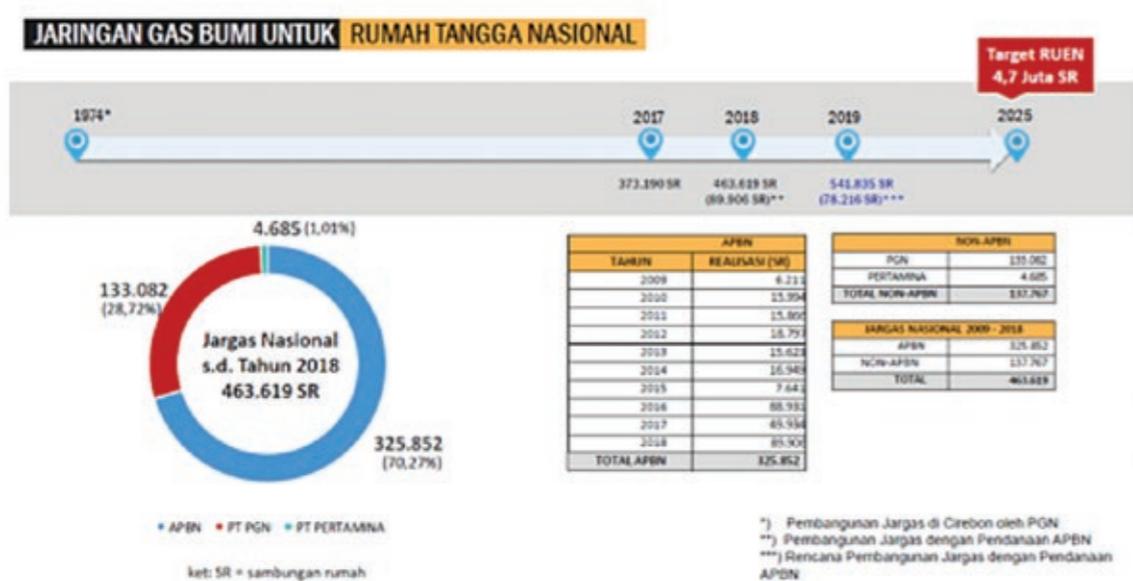
Tahun 2019 ini, jargas dibangun di 16 lokasi, yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi,

Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kota Lamongan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Wajo.

Salah satu syarat pembangunan jargas dilakukan di daerah yang memiliki sumber gas atau dekat dengan sumber gas. Salah satu contoh proyek pembangunan yang telah rampung dilakukan pada 2019

ini adalah proyek jargas di Dumai, Riau. Lewat proyek tersebut, 4743 rumah telah terpasang jaringan gas menuju dapur rumah tangga warga kota Dumai. Tentunya, hal ini telah berimbas terhadap pengurangan beban subsidi penggunaan LPG di masyarakat.

Dua lokasi lain pembangunan jargas tahun ini berada di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan. Pembangunan jargas di wilayah tersebut dibangun dengan APBN



Tahun Anggaran 2019, dengan dasar Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 333.7 K/12/MEM/2015 dan Nomor 119 K/10/MEM/2019.

Total SR yang sudah terpasang untuk jargas di dua kabupaten ini adalah 8.150 SR yang terbagi menjadi 11 sektor, dengan perincian di Kabupaten Probolinggo sebanyak lima sektor sementara sisanya di Pasuruan. Berdasarkan rencana kerja, seharusnya jumlah sambungan yang terbangun 8.000 SR. Namun untuk mengakomodir antusiasme masyarakat terhadap jargas, maka Ditjen Migas melakukan efisiensi dan optimalisasi belanja anggaran pembangunan jargas Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan, sehingga dapat menambah sambungan sebanyak 150 SR.

Manfaat lebih

Pembangunan jargas memiliki beragam manfaat lebih yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Pemanfaatan jargas, misalnya, menjadi salah satu energi alternatif pengganti BBM, yang diharapkan dapat mengurangi beban subsidi LPG 3 Kg, yang jumlahnya selalu meningkat dari 6,2 juta ton pada 2017 naik menjadi 6,45 juta ton pada 2018.

Peningkatan beban subsidi itu, selain penyaluran subsidi yang cenderung salah sasaran, juga disebabkan lebih

dari 70% kebutuhan LPG di dalam negeri harus diimpor sehingga ikut memperbesar defisit neraca migas dalam beberapa tahun terakhir ini.

Oleh karena itu, untuk mengatasi membengkaknya subsidi dan mengurangi impor LPG, Kementerian ESDM, berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga.

Selain itu, pemanfaatan jargas berarti menggunakan sumber energi yang lebih efisien, lebih aman, ramah lingkungan, dan harganya lebih murah dibandingkan penggunaan tabung LPG 3 Kg.

Sebagai gambaran, harga jargas golongan rumah tangga (rumah susun, rumah sederhana, ataupun rumah sangat sederhana) berada di kisaran Rp4.250/m3. Bandingkan dengan harga LPG 3 Kg yang senilai Rp 5.000/m3. Jelas bahwa penggunaan jargas lebih murah daripada pemakaian LPG.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto, pembangunan jargas diharapkan mampu mengurangi pemakaian LPG 3 kg dari warga, yang berarti mengurangi subsidi pemerintah. Sebagai ilustrasi, satu rumah tangga yang biasanya

menggunakan 2 tabung LPG 3 Kg/ bulan, maka dengan adanya jargas, diprediksi akan menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu metrik ton pada tahun depannya.

Singkatnya, pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga lebih menghemat subsidi LPG, yaitu sekitar Rp178 miliar per tahun atau jumlah impor LPG yang berkurang sekitar 25.500 ton per tahun.

Berkat adanya proyek jargas ini, kata Djoko, diharapkan manfaat sumber daya gas bumi bisa dirasakan sebesar-besarnya oleh masyarakat. Pemanfaatan energi yang murah dan lebih ramah lingkungan ini pada akhirnya akan mendongkrak daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain rumah tangga, pengusaha UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup besar. Tak pelak, pemanfaatan energi gas bumi ini pun akan mampu meningkatkan daya saing UMKM ketimbang menggunakan sumber energi yang lain.

Memerlukan dukungan dari berbagai pihak

Pembangunan jargas yang optimal memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan yang dimaksud berasal dari pemerintah kota atau pemerintah daerah

terhadap program ini sangat perlu dilakukan. Aparat daerah harus memberikan edukasi tentang pentingnya pemasangan jaringan gas tersebut kepada masyarakat, dan yang paling penting adalah meyakinkan ke masyarakat bahwa pemasangan gas tersebut dijamin aman.

Djoko mengungkapkan, dukungan pemda sangat penting karena berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

Djoko Siswanto menjelaskan, jika pembangunan jargas ini lancar, semua SR akan terbangun sesuai target. Namun dalam kenyataannya, sering kali pembangunan jargas ini kerap mendapat gangguan dari masyarakat sekitar, bahkan ada juga yang dirusak dan dibakar. Jika ini masih terjadi, sebagian pembangunan proyek ini akan tertunda.

“Kami tidak bisa menambah anggarannya sebagai pengganti infrastruktur yang rusak,” ujar Djoko.

Itu sebabnya, guna meminimalkan atau bahkan menghilangkan gangguan-gangguan tersebut, dukungan penuh dari pemda mutlak diperlukan.

“Diharapkan pemda lainnya juga memberikan dukungan serupa, sehingga masyarakat dapat lebih cepat menikmati gas bumi yang bersih dan murah,” tambah Djoko.

Ketika pemerintah daerah telah memberi dukungan optimal, sukses mensosialisasikan ke warga, dan warga telah menyadari tentang perlunya proyek tersebut, peran serta pihak pelaksana (kontraktor) juga penting. Kontraktor harus menjaga kualitas pekerjaannya di lapangan. Kontraktor memiliki andil besar

terhadap sukses atau gagalnya pekerjaan di lapangan.

Terkait pembangunan jargas ini, pemerintah pun menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) selaku anak perusahaan (subholding gas bumi) untuk melaksanakan penyusunan *front end engineering design-detail engineering design construction* (FEED-DEDC).

Tak hanya BUMN, keterlibatan BUMS pun tak kalah penting dalam penyebarluasan pembangunan jargas. Hal ini, contohnya, terlihat pada pembangunan jargas di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Jawa Timur.

“Sumber pasokan gasnya berasal dari Husky CNOOC Madura Ltd dengan jumlah volume alokasi gas sebesar 0,2 mmscfd,” papar Djoko di sela-sela peresmian jargas di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, Rabu (16/10).

Sementara itu, Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto menambahkan, total sambungan gas rumah tangga yang dibangun menggunakan dana APBN di Jawa Timur hingga saat ini mencapai 66.111 SR.

“Diharapkan dengan bertambahnya sambungan gas rumah tangga di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan, memberi banyak manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Jika pendekatan kontraktor buruk terhadap masyarakat sekitar, maka dipastikan bahwa pekerjaan menjadi terhambat. Sebagai contoh, pemasangan pipa gas menuju ke rumah warga, pasti akan dilakukan pembongkaran jalan. Setelah pipa terpasang, kadang kontraktor lambat untuk menimbun tanah kembali (reinstatement), sehingga timbul gejala ketidaksenangan para warga

terhadap proyek tersebut. Belum lagi jika ada kecelakaan yang dialami warga, ketika tanah galian masih dalam kondisi terbuka. Pasti akan terjadi dari warga yang berimbas kepada ganti rugi ataupun tindakan pemberhentian pekerjaan.

Bentuk dukungan juga diperlukan dari institusi negara lain, seperti BPH Migas. Berdasarkan Pasal 46 ayat 3 UU Migas 22/2001 dan PP 36/2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Pasal 9 ayat (1) huruf d bahwa BPH Migas memiliki tugas melakukan pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan gas bumi melalui pipa. Dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari badan usaha serta kemampuan daya beli masyarakat.

Pada November lalu, BPH Migas menetapkan harga jargas pada 11 kabupaten/kota. Dengan begitu, BPH Migas berdiri telah menetapkan harga Jargas di 50 kabupaten/kota dengan harga jual di bawah harga pasar gas LPG 3 Kg dan 12 Kg.

Salah satu tantangan utama dalam mengejar target pembangunan jargas hingga 2025 menyangkut kebutuhan dana yang terbilang sangat besar. Berdasarkan perhitungan PGN untuk membangun jargas, dibutuhkan belanja modal sebesar Rp12,5 triliun. Untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan jargas tersebut, ada beberapa alternatif sumber dana selain dari APBN. Sebut saja misalnya dana internal badan usaha maupun kerja sama kemitraan PGN dengan Badan Usaha lainnya.

Ke depan, sebagai salah satu solusi lainnya, Pemerintah akan memulai skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jargas rumah tangga dengan melibatkan pendanaan dari badan usaha yang dimulai pada tahun 2022. ●

CAPAIAN KINERJA 2019

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

PENANDATANGANAN HASIL LELANG WK DI TAHUN 2019

3 WK

(Anambas, Selat Panjang dan West Ganai)



KONTRAK PERPANJANGAN DAN ALIH KELOLA WK MIGAS

1 WK Alih Kelola

4 WK Perpanjangan



BONUS TANDA TANGAN

Juta US\$ 43,6 Miliar US\$ 1,04

Hasil Lelang 3 WK Tahun 2018, dan 3 WK Tahun 2019 yang di tandantangani pada tahun 2019

Kontrak Perpanjangan dan Alih Kelola WK Migas

PENERIMAAN MIGAS

PNBP SDA : **Rp 120,42 Triliun**
(Target Rp 159,78 Triliun)

PNBP Fungsional : **Rp 13,27 Triliun**
(Target Rp 10,31 Triliun)

PPh Migas : **Rp 58,38 Triliun**

LIFTING MIGAS

- Lifting Minyak : **746 MBOPD**
(Target : 775 MBOPD)
- Lifting Gas Bumi : **1.057 MBOEPD**
(Target : 1.250 MBOEPD)
- ICP Rata-rata : **US\$62,37/barrel**

INVESTASI MIGAS

Miliar US\$ 12,94

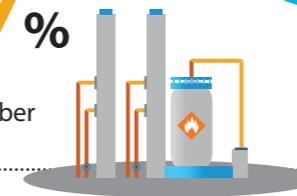
(Target: US\$13,43 miliar)



ALOKASI GAS DOMESTIK

65,87%

* Status s.d. November 2019



INFRASTRUKTUR MIGAS

Jargas : **74.496 sambungan rumah di 16 Kab/Kota**

Konkit Nelayan : **13.305 Paket untuk Nelayan Sasaran di 38 Kab/Kota**

Konkit Petani : **1.000 Paket untuk Petani Sasaran di 4 Kab/Kota**

KEBIJAKAN HARGA

Implementasi Formula Harga BBM baru menurunkan Harga BBM Umum

MANDATORI B20

Capaian **99,51%** | Potensial saving Miliar US\$ **2,94**

PERIZINAN ONLINE

- Diluncurkan **6 Agustus 2019**
- Terintegrasi dengan **OSS & Ditjen Pajak**
- Menerbitkan **95 Izin Usaha Hulu Migas, 394 Izin Usaha Hilir Migas dan 118 Non Izin Teknik dan Lingkungan Migas**

REALISASI ANGGARAN MIGAS

96,58%

dari Pagu **1,17 Triliun rupiah**





HARI JADI PERTAMBANGAN DAN ENERGI KE-74



PEMBUKAAN PORSENI PERAYAAN HUT PERTAMBANGAN DAN ENERGI KE-74



Pemerintah Tangani Kecelakaan PHE ONWJ Hingga Tuntas



Tumpahan minyak akibat kebocoran proyek hulu energi sumur YYA-1 Blok Offshore North West Java (ONWJ) milik Pertamina di pesisir pantai utara Karawang mulai mencemari laut Jakarta. Pemerintah pusat turun tangan menangani tumpahan tersebut hingga tuntas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto menyampaikan, tim dari Kementerian ESDM telah berada di lokasi kejadian sejak pekan lalu. Saat ini, petugas sedang melakukan pengeboran miring untuk menutup sumber keluarnya gelembung gas yang berpotensi menimbulkan kebocoran lanjutan. Sebagai catatan, anjungan tersebut belum berproduksi.

“Risiko yang paling fatal adalah *rig* dan *platform* tenggelam tetapi sekarang baru miring 8 derajat,” ujar Djoko di Kementerian ESDM, Rabu (17/7).

Berdasarkan laporan yang diterimanya, selain gelembung gas, saat ini sudah ada minyak yang

bocor (*oil spill*) ke laut. Namun, ia belum mendapatkan laporan terkait jumlahnya.

Petugas sudah mengantisipasi dan langsung turun untuk mencegah meluasnya penyebaran minyak. Salah satu caranya dengan menggunakan peralatan yang digunakan untuk mengurung tumpahan minyak di air (*oil boom*).

“Begitu minyak keluar ditangkap, angkat dan bereskan,” katanya.

Sejauh ini, tim belum melakukan investigasi lanjutan atas penyebab kejadian tersebut. Sama seperti upaya penanganan kejadian lainnya, di tahap awal, tim fokus pada keselamatan orang dan lingkungan.

“Saat ini tidak ada korban karena sudah evakuasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Pertamina terus mengintensifkan penanganan operasi pasca peristiwa *oil spill* di sekitar anjungan lepas pantai YY PHE ONWJ dengan memasang lima

unit *Giant Octopus Skimmer* dan membentang 5 x 400 meter *Static Oil Boom* di sekitar anjungan YY di wilayah Karawang Jawa Barat.

Strategi ini dinilai efektif menanggulangi masalah saat ini. *Static Oil Boom* mampu menahan penyebaran, sedangkan *Giant Octopus Skimmer* digunakan untuk mengangkat *oil spill* yang tertampung di *Static Oil Boom* tersebut.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan bahwa *Static Oil Boom* ditempatkan di sekitar anjungan YY yang diindikasikan terdapat sumber utama keluarnya minyak mentah sehingga dapat mengisolasi minyak tersebut agar tidak melebar kemana-mana di lautan. “Pertamina juga menurunkan 5 *Giant Octopus Skimmer* yang dapat menyedot *oil spill* dengan kecepatan tinggi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Alat ini dinilai mampu mengangkat minyak dengan kecepatan sekitar 250 ribu liter per jam. Selanjutnya *oil spill* dipompa ke kapal-kapal untuk penampungan sementara. Selain penggunaan *Static Oil Boom* dan *Giant Octopus Skimmer*, Pertamina juga tetap menyiagakan puluhan kapal yang membentangkan *Dynamic Oil Boom* secara berlapis, sehingga mengurangi potensi *oil spill* yang tidak tertangkap dan terbawa arus sampai ke pesisir pantai. ●

Penandatanganan Komitmen Pembangunan Jargas Tahun 2020

Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas mengadakan rapat koordinasi pembangunan jargas tahun anggaran 2020 dengan mengundang *stakeholder* terkait, termasuk 54 Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kota yang akan menikmati manfaat jargas. Rapat koordinasi tersebut berlangsung di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (25/7).

Di akhir acara, komitmen dan sinergi bersama ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Koordinasi Rencana Pembangunan Jargas Tahun Anggaran 2020. Penandatanganan disaksikan oleh Plt Dirjen Migas Djoko Siswanto, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso serta Direktur Infastruktur dan Teknologi PT PGN Dilo Seno Widagdo.

Pemanfaatan jargas menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional dengan lahirnya Perpres No. 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

“Kami mengharapkan bahwa manfaat gas bumi sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan terlebih kompetitif dibanding energi lain,” ujar Djoko Siswanto pada kesempatan tersebut.

Djoko menyampaikan, kegiatan pembangunan jargas merupakan bagian dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Tahun 2015-2030

karena dapat memenuhi kebutuhan energi yang bersih, bersaing, ramah lingkungan, dan efisien. Saat ini, Pemerintah telah melaksanakan pembangunan jargas sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2018 dengan jumlah sambungan sebesar 325.852 Sambungan Rumah (SR) di 16 Provinsi meliputi 40 Kabupaten/Kota.

Dukungan Pemerintah Daerah terhadap pembangunan jargas sangat penting karena berdasarkan pengalaman selama ini, terdapat beberapa kendala non teknis yang berpotensi menghambat pembangunan jargas untuk rumah tangga seperti perizinan, maupun permasalahan sosial yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan.

Daerah yang rencananya akan dibangun jargas tahun 2020 adalah Kab. Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Timur, Kota Langsa, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Deli serdang, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kota Batam, Kota Sarolangun dan Kota Jambi.

Lalu, Kab. Muaro Jambi, Kab. Musi Rawas, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kota Palembang, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu,

Kab. Muara Enim, Kota Prabumulih, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Bandar Lampung, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

Selain itu, Kab. Karawang, Kab. Subang, Kota Cirebon, Kab. Cirebon, Kota Semarang, Kab. Blora, Kab. Lamongan, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab Wajo, Kab. Banggai, Kota Tarakan, Kota Balikpapan, Kab. Kutai Kartanegara, Kota Samarinda dan Kab. Penajam Paser Utara.

Untuk pembangunan jargas tersebut, Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*sub holding* gas bumi), untuk melaksanakan penyusunan FEED (*Front End Engineering Design*)-DEDC (*Detail Engineering Design Construction*) yang ditargetkan rampung pada Oktober 2019. ●



Kementerian ESDM Luncurkan Aplikasi Perizinan *Online*



Kementerian ESDM meluncurkan Aplikasi Perizinan *Online* ESDM di Ruang Sarulla Kementerian ESDM, Selasa (6/8). Peluncuran Aplikasi Perizinan *Online* tersebut untuk meningkatkan layanan investasi dan mempermudah proses pengajuan berusaha serta mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Aplikasi tersebut meliputi perizinan di Ditjen Migas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Aplikasi ini menunjukkan komitmen Kementerian ESDM dalam pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK 2019-2020), terutama pada aksi peningkatan pelayanan dan kepatuhan perizinan dan penanaman modal serta terkait dengan aksi perbaikan tata kelola data dan kepatuhan industri ekstraktif.

Jangka waktu penyelesaian perizinan secara *online* ini, sekitar 7 hari kerja. Namun ada pula perizinan yang membutuhkan waktu sekitar 14 hari karena harus dilakukan pengecekan ke lapangan. Aplikasi Perizinan

Online ESDM ini telah mampu terintegrasi dengan 56 perizinan layanan dari total 70 layanan yang harus disiapkan. Selain itu juga terintegrasi dengan *Online* Single Submission (OSS) dan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Ditjen Pajak. Saat ini, layanan perizinan yang ada di Kementerian ESDM berjumlah 70 perizinan yang terdaftar di Kemenko Perekonomian. Aplikasi Perizinan *Online* yang diluncurkan ini telah mampu menangani 56 perizinan, menambah dan melengkapi perizinan yang selama ini dilimpahkan ke BKPM. ●



Pengumuman Pemenang Lelang WK Migas Konvensional Tahap II Tahun 2019

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengumumkan Pemenang Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Konvensional Tahap II Tahun 2019 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/8). Jumlah WK Migas yang ditawarkan dalam lelang pada tahap ini sebanyak empat WK, yang terdiri dari tiga WK Eksplorasi, yaitu Bone, Kutai dan West Ganai dan satu WK Eks-Produksi, yaitu West Kampar.

Melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri ESDM Nomor: 0163.K/13/DJM.E/2019 tanggal 22 Agustus 2019 telah ditetapkan Pemenang Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional Tahap II Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Dari 13 perusahaan, hanya satu peserta lelang yang memberikan penawaran yaitu konsorsium Eni,

Pertamina, dan Neptune Energy di West Ganai. Nilai investasi komitmen pasti dari WK tersebut sebesar US\$ 159,3 juta. Sedangkan bonus tanda tangan sebesar US\$ 30,1 juta. WK West Ganai berlokasi di lepas pantai Kalimantan Timur. Pemerintah menetapkan bonus tanda tangan minimal US\$ 29 juta dan komitmen pasti yang terdiri dari studi geologi dan geofisik (G&G), pengeboran empat sumur eksplorasi, seismik 3D 600 Km, dan seismik 2D 600 Km². Dengan hasil lelang tersebut, pemerintah menetapkan tiga WM migas yang tidak laku yaitu Bone, Kutai dan West Kampar menjadi Wilayah Kerja *Available*. Pemerintah akan mengevaluasi kembali ketiga wilayah kerja tersebut untuk ditawarkan kembali pada kesempatan lelang berikutnya.

WK West Kampar berlokasi di Riau dan Sumatera Utara. Blok migas ini

terakhir berproduksi pada 27 Maret 2017 sebesar 112 barel minyak per hari (BOPD). Pemerintah menetapkan bonus tanda tangan minimal US\$ 5 juta dan komitmen pasti minimal US\$ 64,43 juta untuk studi G&G, seismik 2D 500 Km², seismik 3D 200 Km, dan pengeboran enam sumur eksplorasi. WK Kutai berlokasi di daratan dan lepas pantai Kalimantan Timur. Bonus tanda tangan untuk WK migas ini minimal US\$ 2,5 juta dan komitmen pasti terdiri dari studi G&G dan seismik 3D 1.000 Km². WK Bone berlokasi di lepas pantai Sulawesi Selatan. Bonus tanda tangan minimal US\$ 2,5 juta dan komitmen pasti terdiri dari studi G&G dan seismik 3D 500 Km². Selain WK tersebut di atas, saat ini masih berjalan Lelang WK Migas Tahap III 2019 yang terdiri dari empat Wilayah Kerja, yaitu East Gebang, Belayan I, West Tanjung I dan Cendrawasih VIII. ●

Perlu Dikoreksi, Neraca Dagang Indonesia Defisit Akibat Impor Migas

Adanya anggapan defisitnya neraca dagang Indonesia akibat impor migas perlu dilihat dari berbagai sudut pandang. Perbandingan ekspor dan impor di sektor migas bisa menjadi salah satu tolok ukur.

Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto menyampaikan hal tersebut di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (16/8). Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan, untuk membuat neraca perdagangan migas mengalami surplus adalah hal yang dapat dilakukan. Caranya, dengan berhenti impor bahan bakar dan mengespor gas yang dimiliki, meski tentu ada risikonya.

“Kalau hanya untuk memperbaiki neraca perdagangan, kita ekspor saja semua gasnya. Tapi risikonya apa kalau semua gas dieskpor? Pabrik pupuk tutup, pabrik petrokimia tutup, akhirnya semua produk petrokimia kita impor. Mau begitu?” katanya.

Bukan komoditas semata

Menurut Djoko, seperti yang tercantum pada PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional,

sumber daya energi yang ada tidak hanya dijadikan sebagai komoditas ekspor semata, namun juga sebagai pembangunan nasional.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan ekspor migas pada Juli 2019 mengalami kenaikan sebesar 23% atau senilai US\$169,7 juta. Sementara untuk total nilai impor migas bulan Juli 2019 mengalami penurunan sebesar 4% atau senilai US\$55,4 juta.

“Data ini dari BPS loh ya. Jadi saya kira pemberitaannya itu harus lebih berimbang. Kita punya catatan yang positif tolong disampaikan juga ke masyarakat. Dari Juni 2019 ke Juli 2019 ini ada kenaikan 31,02% dari US\$0,74 miliar ke US\$1,61 miliar. Ini harus disampaikan juga ke masyarakat,” kata Djoko.

Saat ini, Kementerian ESDM juga sedang berupaya mengontrol impor migas dengan salah satunya penggunaan kompor listrik. Selain itu, program B20 yang direncanakan akan ditingkatkan ke B30 dan B50 pada akhir tahun 2019, secara bertahap akan ditingkatkan ke B100.

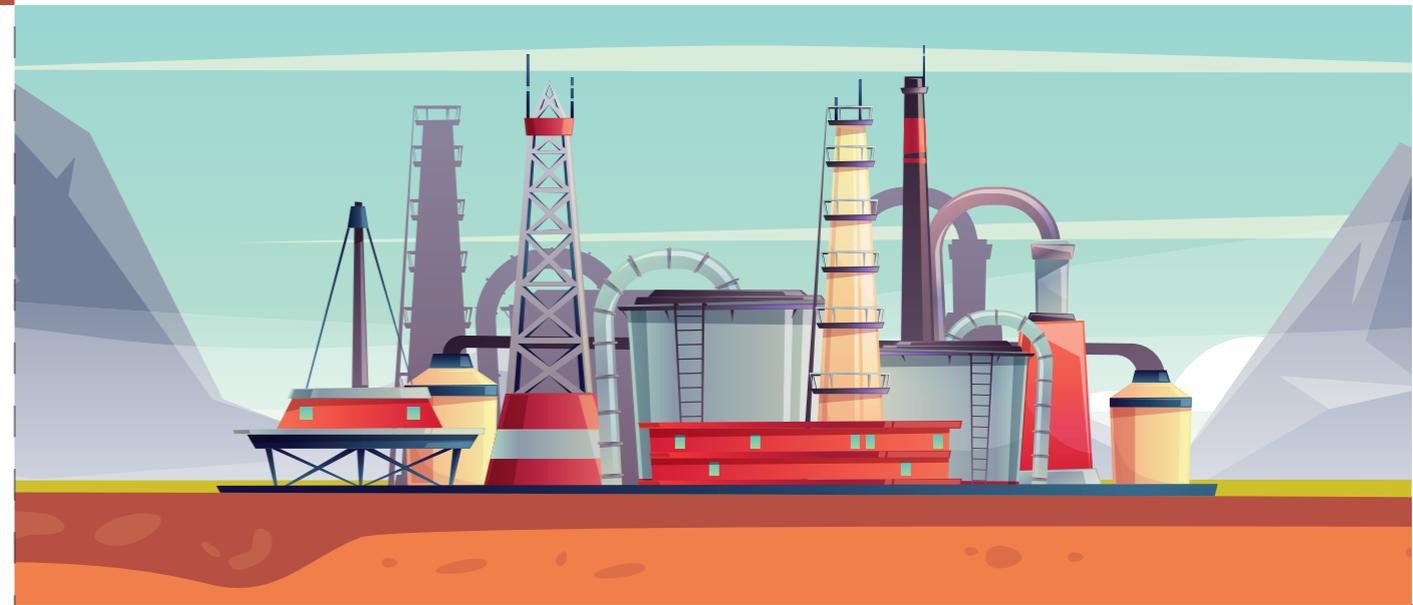
Menurut Djoko, pengembangan biodiesel tersebut akan mengurangi impor solar karena digantikan oleh biodiesel yang diproduksi dalam negeri.

Lapangan Banyu Urip perkuat ketahanan energi nasional

Sebenarnya, ketahanan energi nasional diperkuat dengan penjualan minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip bagian ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) ke Pertamina Integrated Supply Chain (ISC). Jumlah pembelian minyak dari ExxonMobil ini sebanyak 650.000 barel untuk periode September 2019.

Djoko Siswanto, mewakili Menteri ESDM, Jumat (20/9), menyaksikan pengapalan perdana minyak mentah ini di Kapal Alir-Muat Terapung (FSO) Gagak Rimang, Tuban, Jawa Timur.

Turut menghadiri proses lifting dari FSO Gagak Rimang ke Kapal Tanker MT Ocean Li, adalah Kepala SKK Migas yang diwakili Kepala Divisi Audit KKKS Eksplorasi, Syukri Usman; Senior Vice President Integrated Supply Chain Pertamina (Persero) Hasto Wibowo dan President ExxonMobil Cepu Limited, Louise McKenzie.



Minyak mentah ini adalah tambahan volume minyak EMCL yang dijual ke pasar setelah Domestic Market Obligation (DMO) terpenuhi. Minyak tersebut dihasilkan dari Lapangan Banyu Urip di Blok Cepu, Bojonegoro dan diolah di Fasilitas Pengolahan Pusat, yang memproduksi hingga 220.000 barel per hari. Minyak tersebut kemudian dialirkan melalui jalur pipa sepanjang 95 kilometer ke Palang, Tuban, kemudian ke Kapal FSO Gagak Rimang di lepas pantai Tuban, Jawa Timur.

Plt. Dirjen Migas Djoko Siswanto mengapresiasi penjualan minyak bagian KKKS untuk domestik ini. “Kementerian ESDM tentunya senang sekali, bangga sekali kita bisa membeli minyak mentah dari ExxonMobil yang sudah sejak lama kita harapkan,” ujar Djoko.

Penambahan pasokan minyak mentah untuk domestik ini sangat penting untuk mengurangi impor. Ketersediaan BBM diperlukan untuk mendorong perekonomian nasional. “Semoga dengan (penjualan minyak ke domestik) ini, neraca perdagangan kita, khususnya impor jadi berkurang,” katanya.

Dia melanjutkan, beberapa tahun silam, amat sulit bagi Pemerintah membeli minyak bagian KKKS karena di kontrak kerja sama yang diteken juga menyatakan bahwa KKKS dapat

menjual minyak bagiannya ke mana saja. Di sisi lain, sejak tahun 2003, Indonesia telah menjadi net importir minyak. Selama ini, KKKS menjual minyaknya ke luar negeri dan dibeli lagi untuk keperluan dalam negeri. Proses ini mengakibatkan biaya transportasi menjadi besar.

“Minyak KKKS dibawa keluar pakai kapal terus masuk lagi, kita beli. Kan ada ongkos. Paling tidak (dengan penjualan langsung ke domestik) ada (biaya) transport yang bisa di-saving,” tambahnya

President ExxonMobil Cepu Limited, Louise McKenzie, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pengapalan minyak mentah ini untuk mendukung ketersediaan minyak domestik. Dia juga berterima kasih atas dukungan Pemerintah, Pemda serta masyarakat terhadap kegiatan operasi Blok Cepu.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, para mitra Blok Cepu, serta masyarakat sekitar yang terus mendukung kegiatan operasi Banyu Urip,” ujar Louise.

Senior Vice President Integrated Supply Chain PT Pertamina (Persero) Hasto Wibowo, menyambut gembira penjualan minyak mentah ini karena dengan demikian, Pertamina tidak

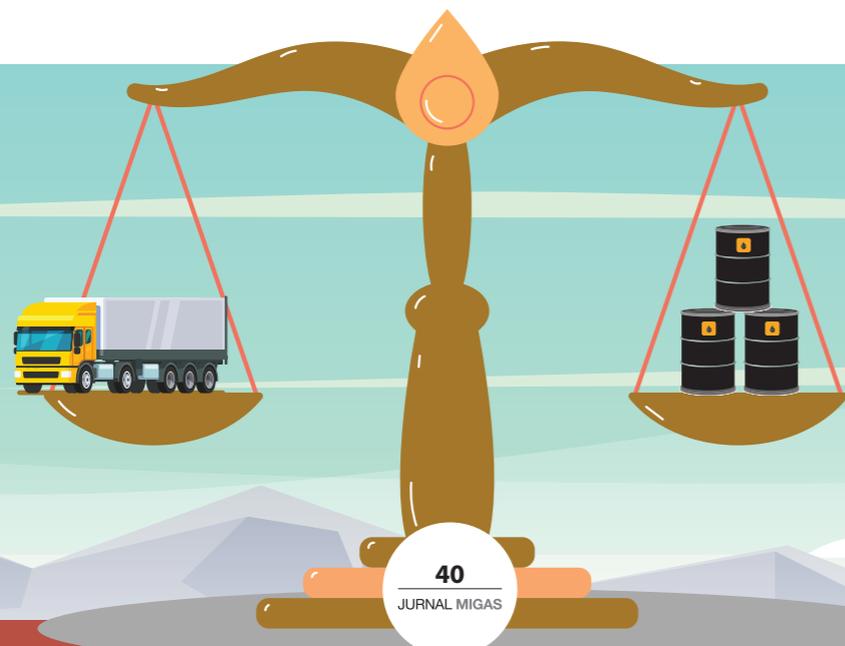
perlu lagi mengimpor minyak dari Azerbaijan, Angola dan beberapa negara lainnya. “Dengan adanya suplai ini, kita total sudah tidak mengimpor minyak jenis *heavy crude* lagi,” tambahnya.

Pasokan minyak mentah dari ExxonMobil ini juga membuat Pertamina tidak perlu khawatir kekurangan pasokan, menyusul kejadian kebakaran di kilang Saudi Aramco akibat serangan drone. “Kejadian di Saudi Aramco itu membuat kami telepon kesana kemari untuk memastikan *reliability supply* untuk ISC selanjutnya” katanya.

Pertamina mengharapkan agar kerja sama ini dapat terus dilanjutkan dengan jumlah yang lebih besar.

Sementara itu, Menteri Perdagangan yang baru dilantik Agus Suparmanto mengaku mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk meningkatkan ekspor, impor dan perjanjian luar negeri. Ia berkomitmen membuat sejumlah perjanjian bilateral sekaligus meninjau perjanjian mana saja yang selama ini memberi profit.

Ia juga akan memantau produk mana saja yang bisa diekspor untuk ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Sebab menurutnya, produk Indonesia yang potensial di luar negeri masih ada yang kualitas dan kuantitasnya rendah. ●



Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 Dorong Kemitraan Industri Gas

Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka dengan resmi Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019. Perhelatan yang telah empat kalinya digelar ini berlangsung di Jakarta pada tanggal 31 Juli–2 Agustus 2019. Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 didukung oleh Kementerian ESDM dan SKK Migas serta diselenggarakan oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dengan menampilkan program konferensi *multitrack*, baik yang strategis maupun teknis, Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 menjadi salah satu *event full stream* paling penting di Indonesia. Ajang ini diadakan untuk menciptakan berbagai kemitraan bisnis, mendorong terciptanya berbagai pembicaraan yang *investment-friendly*, dan untuk memfasilitasi kemajuan pengembangan energi di Indonesia.

Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 menghadirkan sejumlah pembuat kebijakan di industri gas nasional, pembicara dari komunitas korporasi dan pakar teknis, yang semuanya mewakili industri gas dan energi yang dinamis di Indonesia.

“Pengembangan industri gas di Indonesia, dari hulu sampai ke hilir, mulai dari eksplorasi sampai eksploitasi, sedang bertumbuh. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan pembangunan gas reservoir berkapasitas besar, seperti yang sedang berlangsung dengan Inpex dan Shell di Maluku. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan besar di bidang eksplorasi gas



untuk melakukan eksplorasinya di Indonesia,” kata Jonan.

Salah satu sponsor di *event* ini adalah Mubadala Petroleum. Naser Al Hajri, SVP Southeast Asia Mubadala Petroleum berkata, “Kami bangga bisa mendukung *event* ini. Asia Tenggara dan khususnya Indonesia adalah pusat eksplorasi upstream sampai produksinya. Kami berkomitmen untuk Asia Tenggara dan khususnya Indonesia yang sangat strategis bagi perusahaan kami. Kami bangga membangun relasi yang baik dengan seluruh *stakeholder* gas di Indonesia, merekrut banyak tenaga kerja ahli lokal dan ikut serta melakukan pengembangan masyarakat di mana kami beroperasi”.

Dengan jadwal yang lebih padat dan peluang lebih besar untuk berinteraksi dan berjejaring dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gas Indonesia Summit menghadirkan peluang bagi bisnis baru untuk mendapat sorotan mengenai berbagai layanan,

keterampilan, dan teknologinya, dan merupakan *platform* yang ideal untuk berinteraksi dengan para pemain di industri ini. Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 diproyeksikan dihadiri oleh 500 lebih delegasi konferensi, 80 lebih pembicara ahli, 80 lebih perusahaan yang akan berpameran, 40 lebih negara perwakilan, 20 lebih sesi teknis, 40 lebih sesi strategis dan sorotan.

Yang tidak kalah penting dari konferensi strategis ini adalah hadirnya konsep “COTE” yang interaktif, di mana Gas Indonesia Summit & Exhibition 2019 akan mengadakan serangkaian presentasi teknis di stand perusahaan-perusahaan penting yang selama ini telah mendorong perubahan dalam industri gas alam di Indonesia. Topik teknis yang dibahas meliputi pengembangan gas di hulu, teknologi gas dan LNG di midstream, sistem energi masa depan, dan gas di sektor hilir serta *end-user*. ●



Pameran dan Konvensi IPA ke-43 Diikuti 20.000 Pelaku Industri Migas

Sekitar 20.000 pelaku industri migas mengikuti Convention and Exhibition Indonesian Petroleum Association (IPA) ke-43 di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 4–6 September 2019. Jumlah ini menandakan optimisme industri migas mengarah ke hal yang lebih positif.

Menteri ESDM Ignasius Jonan membuka secara resmi Convention and Exhibition IPA ke-43. Dalam pameran bergengsi tahunan ini, Menteri Jonan mengatakan, konvensi IPA adalah konvensi migas terbesar

di sektornya. Sementara kondisi saat ini, tidak ada yang bisa membuat cadangan minyak baru.

“Karena tidak ada cadangan minyak baru, sehingga pendekatan kami adalah efisiensi bisnis migas,” ujarnya di hadapan pelaku industri migas saat memberi sambutan.

Oleh sebab itu, lanjut Jonan, pemerintah menerbitkan aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberikan insentif perpajakan atau kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi.

Sementara itu, *Acting President* IPA (Penjabat Presiden IPA), Louise

Mckenzie, mengatakan, IPA mengapresiasi pemerintah Indonesia atas upaya dalam meningkatkan iklim investasi migas.

“Bersama kita berusaha untuk menarik investasi dan bersama meningkatkan produksi Migas Indonesia,” ujarnya.

Tahun ini, lanjut dia, merupakan sebuah kebanggaan untuk melaksanakan Pameran dan Konvensi IPA ke-43, karena dihadiri sekitar 20.000 peserta dari berbagai belahan dunia.

“Terima kasih kepada seluruh *stakeholders* serta dukungan dari Pemerintah Indonesia, untuk bekerja bersama menyokong ketahanan energi di Indonesia dalam jangka panjang,” pungkasnya. ●



Ditjen Migas Terima Kunjungan Departemen Energi Filipina

Undersecretary Departemen Energi Republik Filipina, Donato D Marcos, melakukan kunjungan ke kantor Ditjen Migas (9/8) dan diterima oleh Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan berbagi pengalaman mengenai kebijakan dan pengelolaan industri LNG di Indonesia.

Undersecretary Donato D Marcos didampingi oleh lima orang delegasi Filipina lainnya termasuk Technical Working Group dari sisi hukum dan finansial. Sedangkan dari sisi Indonesia hadir perwakilan dari Ditjen Migas, PGN, PGN LNG dan Nusantara Regas.

“Filipina dan Indonesia satu keluarga ASEAN. Kami dengan senang hati menerima rekan-rekan dari Departemen Energi Filipina untuk mendiskusikan industri LNG di Indonesia,” kata Plt. Dirjen Migas, Djoko Siswanto, saat membuka pertemuan.

Undersecretary Departemen Energi Filipina menyampaikan bahwa saat ini negaranya sedang membangun industri gas hilir di dalam negeri. Filipina mendapatkan bantuan

teknis dalam Program Gas Policy Development Project (GPDP) di bawah dukungan US Department of State.

“Kami telah berada di Indonesia selama 4 hari dan telah belajar banyak tentang LNG di Indonesia,” ujar Undersecretary Donato D Marcos dalam sambutan singkatnya.

Selain kunjungan ke Ditjen Migas, delegasi Filipina juga telah berkunjung ke fasilitas LNG milik PT Perta Arun Gas di Aceh dan kantor PT Nusantara Regas di Jakarta. Dalam kunjungan dimaksud, Filipina mengagumi pengalaman Indonesia dalam mengembangkan dan mengelola industri LNG baik dari sisi lingkungan dan keselamatan.

Untuk memberikan gambaran industri LNG Indonesia, Plt Dirjen Migas menyampaikan paparan singkat mengenai regulasi, kebijakan, dan perencanaan industri LNG di dalam negeri, termasuk kebijakan pemanfaatan gas dengan target sebesar 22% gas dalam bauran energi pada tahun 2025, serta penetapan harga gas hulu. Sedangkan salah satu pencapaian Indonesia dalam pengembangan infrastruktur gas

adalah terbangunnya 3 FSRU di Lampung, Jawa Barat, dan Bali.

Dalam pertemuan ini, PGN menyampaikan perkembangan kerja sama dengan Filipina di mana PGN telah menyampaikan Letter of Intent dari PGN kepada entitas Filipina guna menjajaki kerja sama komersialisasi LNG di Filipina.

Kunjungan ke Indonesia kali ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan ketrampilan dari sisi teknis dan komersial dalam kegiatan operasi fasilitas LNG serta praktik terbaik dari sisi keselamatan dalam proses pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas tersebut.

Delegasi Filipina mengakui bahwa Indonesia punya lebih banyak pengalaman dan praktik terbaik dalam mengembangkan industri LNG. Kunjungan diharapkan akan menambah informasi dan pembelajaran dalam menyusun peraturan dan kebijakan dalam industri gas hilir di Filipina. Filipina juga menyampaikan bahwa mereka terbuka untuk bekerja sama dengan Indonesia di sektor gas mengingat adanya pasar yang potensial di Filipina. ●



Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-74 Tekankan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan

Menteri ESDM Ignasius Jonan bertindak sebagai Pembina Upacara dalam Apel Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi Ke-74 di Kementerian ESDM, Jakarta, Sabtu (28/9). Dalam amanahnya Menteri ESDM meminta kepada seluruh pegawai dan seluruh pemangku kepentingan untuk peduli dengan lingkungan dari ancaman pemanasan global atau *global warming*, karena menurut Jonan dampak pemanasan global akan sangat terasa bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Pembangunan energi bersih yang berkelanjutan atau yang kita kenal dengan energi baru terbarukan (EBT) penting untuk dipikirkan. Sebagai Pembina sektor wajib melaksanakan pengembangan energi bersih, kenapa, pertama, masalah lingkungan hidup, seluruh dunia juga sudah mulai mengurangi apa yang disebut efek pemanasan global,” ujar Jonan kepada seluruh peserta Apel HUT Pertambangan dan Energi ke-74.

Dampak pemanasan global saat ini sudah dapat dirasakan. Jonan menceritakan, saat dirinya tinggal di Bandung 10 tahun yang lalu, suhunya masih sangat sejuk, berbeda dengan yang dirasakan saat ini.

HUT Pertambangan dan Energi ke-74 diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) yang berlangsung di Plaza ESDM, Senin (26/8). Pembukaan Porseni diawali dengan upacara yang diikuti oleh 20 kontingen dari para unit utama di lingkungan Kementerian ESDM, BUMN sektor ESDM dan Dharma Wanita Kementerian ESDM.

Menteri Jonan menyambut gembira penyelenggaraan acara HUT Pertambangan dan Energi ke-74 serta meminta para atlet berlomba dengan penuh semangat. Namun demikian, lanjut Jonan, hal terpenting dari pertandingan adalah komunikasi, kebersamaan serta kerja sama untuk membangun negeri.

Hari Jadi Pertambangan dan Energi diperingati setiap tanggal 28 September oleh seluruh *stakeholder* sektor ESDM. Penetapan hari jadi ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 0738 Tahun 2008 tanggal 27 September 2008 tentang Hari Jadi Pertambangan dan Energi.

Tema peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-74

adalah “Energi Berkeadilan untuk Indonesia Unggul”. “Melalui tema ini, kami mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan di sektor energi dan sumber daya mineral untuk mewujudkan cita-cita energi berkeadilan untuk Indonesia yang unggul melalui kerja dan prestasi bagi bangsa Indonesia,” tutur Pelaksana Tugas Dirjen Migas Djoko Siswanto dalam laporannya selaku ketua panitia.

Rangkaian acara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke-74 dimulai sejak 26 Agustus dan berakhir pada 29 September 2019. Selain Porseni, HUT Pertambangan dan Energi ke-74 juga diisi dengan bakti sosial (donor darah) yang berhasil menyalurkan 11.242 kantong darah, kegiatan ziarah makam ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Makam Arie Frederick Lasut di TPU Sasanalaya, Yogyakarta dan Pemakaman Karet Jakarta. Selain itu, dilaksanakan pula seminar dan pameran, Malam Penghargaan Subroto, kegiatan upacara dan acara kebersamaan. ●



Delapan Perusahaan Migas Terima Subroto Award 2019

Malam Penghargaan Subroto digelar di Djakarta Theater, Jumat (27/9). Sebanyak delapan perusahaan migas menerima Penghargaan Keselamatan Migas Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan.

Subroto Award 2019 merupakan bagian dari rangkaian HUT Pertambangan dan Energi ke-74. Menteri ESDM Ignasius Jonan didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyerahkan Penghargaan Subroto 2019 kepada delapan perusahaan migas yang memperoleh Penghargaan Keselamatan Migas Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan tersebut.

Penghargaan ini merupakan bagian dari 62 Penghargaan Subroto 2019 yang diberikan kepada *stakeholder* yang berperan aktif membangun sektor ESDM. Penghargaan Keselamatan Migas Kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan, diberikan kepada:

1. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha V: PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan
2. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha V: PT Badak NGL
3. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha IV: PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap
4. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II: PT Jakarta Tank Terminal
5. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha II: BP Berau Ltd
6. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I: JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi.
7. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I: PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore
8. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I: ExxonMobil Cepu Limited.

Penghargaan Keselamatan Migas “Patra Nirbhaya Karya” merupakan penghargaan yang diberikan sebagai

bentuk apresiasi Kementerian ESDM cq. Direktorat Jenderal Migas terhadap komitmen KKKS dan BU dalam menjamin kelangsungan keselamatan kerja di kegiatan usaha migas.

Tim Penilai Penghargaan Keselamatan Migas beranggotakan perwakilan Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas, Inspektur Migas dan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM).

Dalam kesempatan ini, Menteri ESDM juga menyerahkan penghargaan kepada KKKS Penyumbang Terbesar PNNP Migas Tahun 2018 yaitu Exxon

Mobil Cepu, CPI Rokan dan Pertamina Hulu Mahakam.

Pada perhelatan tersebut, Menteri Jonan mengapresiasi *stakeholder* yang telah bersama-sama memajukan sektor ESDM. Dia juga meminta *stakeholder* migas untuk mulai menyesuaikan kecepatan mengikuti perubahan dunia yang saat ini menekankan pentingnya energi bersih.

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM juga mengucapkan terima kasih kepada *stakeholder* yang turut serta menyumbang listrik gratis



bagi 500.000 warga kurang mampu yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, antara lain Maluku, Papua, DIY, Jawa Barat serta DKI Jakarta. Sikap empati seperti ini, sangat penting bagi seorang pemimpin.

Sebagai informasi, Tahun 2019 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan Penghargaan Subroto yang digelar sejak tahun 2017. Nama Subroto diambil dari Prof. Subroto selaku Menteri Pertambangan dan Energi periode 1978 - 1988. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian pekan peringatan Hari Jadi

Pertambangan dan Energi PE ke-74 yang diperingati pada tanggal 28 September 2019.

Adapun 10 kategori yang akan dianugerahkan pada Malam Penganugerahan Perhargaan Subroto yaitu:

- Bidang Efisiensi Energi Nasional
- Bidang Kepatuhan PNNP Mineral dan Batubara
- Bidang Keselamatan Ketenagalistrikan
- Bidang Keselamatan Migas Tanpa Kehilangan Jam Kerja Akibat

Kecelakaan

- Bidang PNNP Migas Terbesar
- Bidang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Mineral dan Batubara
- Bidang Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Lindungan Lingkungan (K3LL) Panas Bumi
- Bidang Pengembangan SDM Terbaik
- Bidang Wartawan Energi. ●





The 6th IJEF: Indonesia-Jepang Perkuat Komitmen Pengembangan Blok Masela

The 6th Indonesia-Japan Energy Forum (IJEF) digelar, Kamis (10/10). Selaku tuan rumah pertemuan, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ego Syahril, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM. Sementara Delegasi Jepang dipimpin Deputy Commissioner for International Affairs, Agency for Natural Resources and Energy, Tomohiro Kaneko.

Salah satu hasil penting dari pertemuan ini adalah komitmen Indonesia dan Jepang untuk memperkuat kerja sama pengembangan Blok Masela. INPEX menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan Proyek Masela di Indonesia, sedangkan Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus mendukung berjalannya Proyek Masela.

Kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama melalui peninjauan JAPEX untuk mengembangkan usahanya di sektor

usaha hilir gas bumi di Indonesia. Menanggapi hal ini, Pemerintah Indonesia siap mendukung upaya-upaya kerja sama yang dilakukan oleh Jepang dengan badan usaha migas nasional dan turut membantu memproses perizinan yang dibutuhkan.

Turut menjadi bagian delegasi Indonesia adalah Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, dan Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo. Perwakilan dari lingkungan Kementerian ESDM, Kemenko Maritim, Pertamina, PGN, PLN, Bukit Asam, dan APROBI juga turut hadir selaku delegasi Indonesia.

Delegasi Jepang diwakili oleh Ministry of Economy, Trade and Industry, Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, serta beberapa perusahaan Jepang yang bergerak di industri migas seperti INPEX dan JAPEX.

Sebelum sesi utama, pertemuan ini terlebih dahulu dimulai dengan acara penandatanganan Proyek Hidrogen antara PT PLN dan Toshiba serta Joint Feasibility Study on PLN's Factory and Workshop Development among PT PLN (Persero), Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd and Mitsubishi Corporation.

Pertemuan Indonesia-Japan Energy Forum ke-7 berikutnya disepakati akan diselenggarakan pada tahun 2020 di Jepang.

IJEF merupakan wadah pertemuan sektor energi dan sumber daya mineral antara Indonesia dengan Jepang sebagai hasil kesepakatan kedua negara untuk mendiskusikan potensi peningkatan kerja sama energi kedua dan sumber daya mineral yang melibatkan partisipasi dunia usaha. ●

Pelayanan Fiskal Hulu Migas Kini Serba Online

Setelah peluncuran Aplikasi Perizinan Online ESDM Agustus lalu, Pemerintah meluncurkan Aplikasi Integrasi Single Submission Pelayanan Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Senin (14/10). Aplikasi ini memperpendek waktu pengurusan layanan fiskal impor barang operasi menjadi hanya 15 hari.

"Waktu layanan dari semula 42 hari kerja, kita upayakan menjadi 15 hari," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dalam konferensi pers usai peluncuran aplikasi ini.

Dengan terciptanya Aplikasi Integrasi Single Submission Pelayanan Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas ini, diharapkan terwujud akselerasi terhadap pelayanan publik dengan

memberikan kemudahan dalam pelayanan pemberian fasilitas fiskal bagi para *stakeholder* (pelaku kegiatan usaha hulu migas) yang transparan dan akuntabel.

Fasilitas fiskal migas merupakan kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah, berupa pengurangan atau pembebasan bea masuk atas barang impor yang terkait dengan eksploitasi dan eksplorasi Migas dengan pelaku usaha yaitu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Beberapa efisensi yang dapat terwujud diantaranya proses transaksi, *paperless*, pelaporan dan waktu.

Sebelumnya, pelaku usaha harus melakukan 6 kali proses transaksi ke Kementerian dan Lembaga untuk mendapatkan Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Pembebasan – SKEP, namun dengan

menggunakan aplikasi integrasi ini proses transaksi dapat diefisienkan menjadi satu alur layanan (sekali penyampaian) hingga mendapat KMK Pembebasan.

Metode lama mengharuskan pelaku usaha datang ke masing-masing Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk menyampaikan berkas *hardcopy* permohonan dapat digantikan fungsinya dengan data digital.

Dengan aplikasi integrasi Single Submission Pelayanan Fasilitas Fiskal atas Impor Barang Operasi untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas, sudah disediakan *dashboard* pelaporan, pelaku usaha tidak perlu datang ke K/L untuk menyampaikan laporan. Selain itu ada peningkatan kualitas dan konsistensi data dan memungkinkan integrasi sistem K3S (*system to system*). ●



Ditjen Migas Peduli Kanker Payudara dan Mulut



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggelar Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Mulut di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Selasa (10/12). Kegiatan ini diadakan guna memberikan pemahaman kepada para pegawai mengenai kanker payudara dan kanker mulut yang bisa menyerang siapa saja.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi, Ketua Dharma Wanita Ditjen Migas Lusi Djoko Siswanto dan menampilkan narasumber drg. Andrian Nova Fitri, Sp.PM serta Madelina Mutia dari Love Pink. Love Pink merupakan organisasi nirlaba yang memfokuskan diri pada kegiatan sosialisasi deteksi dini dengan cara Sadari (periksa payudara sendiri).

Dalam kesempatan itu, Iwan Prasetya Adhi meminta agar para pegawai memanfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui sedini mungkin mengenai kanker payudara dan mulut, sehingga dapat terhindar dari kedua penyakit tersebut.

“Sosialisasi ini agar kita dapat mendeteksi kedua penyakit ini sejak awal. Kegiatan ini akan menambah pemahaman kita, sehingga apabila kita terkena penyakit, dapat segera diketahui sejak awal untuk selanjutnya dilakukan pengobatan,” kata Iwan.

Sementara itu, mengawali paparannya, drg. Andrian Nova Fitri, Sp.PM mengungkapkan, tren penyakit saat ini, termasuk kanker mulut, tak hanya didominasi oleh orang tua yang berusia di atas 40 tahun, tetapi juga menyasar anak muda. Hal ini antara lain disebabkan oleh gaya hidup masa kini. Kanker mulut juga lebih banyak diderita oleh laki-laki.

Kanker mulut adalah sekumpulan sel-sel yang tidak terkontrol atau tidak dapat dikendalikan. Penyakit

kanker mulut terutama disebabkan oleh kebiasaan merokok dan minum alkohol serta kebiasaan menyirih.

“Orang yang merokok sekian batang per hari dan lantas minum alkohol, resiko kankernya lebih besar,” kata drg. Andrian Nova Fitri, Sp.PM.

Selain itu, kanker mulut juga bisa disebabkan oleh human papilloma virus (HPV) tipe 16. HPV juga menyebabkan kanker mulut rahim. HPV menyebabkan mutase dari gen P53 yang banyak ditemukan di kanker mulut.

Agar tidak terkena penyakit ini, drg. Andrian Nova Fitri, Sp.PM menyarankan agar berhenti merokok, mengurangi konsumsi alkohol serta rutin memeriksakan kesehatan gigi dan mulut.

“Minimal periksakan kesehatan mulut dan gigi sekali setahun apabila tidak ada gangguan mulut. Jika ada keluhan, jangan bertanya pada saudara pada tetangga atau saudara, melainkan datangilah ahlinya. Dengan demikian, apabila ada

penyakit yang serius, dapat segera diketahui,” pesan Andrian.

Selain itu, perlu dilakukan pemeriksaan mulut secara mandiri di rumah. Caranya, lihat rongga mulut menggunakan cermin dan perhatikan apakah terdapat benjolan, bercak-bercak atau sariawan, serta luka yang lama sembuh di dalam lidah, bibir, langit-langit, dan rongga mulut.

Sementara Madelina Mutia dari Love Pink memaparkan, satu dari delapan perempuan beresiko terdiagnosa kanker payudara.

“Jika tidak ditangani secara serius, pada tahun 2030, angka ini akan berubah menjadi satu dari tiga perempuan beresiko terdiagnosa kanker payudara,” paparnya.

Penyakit kanker payudara juga penyebab kematian nomor satu perempuan di Indonesia.

“Pasien perempuan terbanyak di rumah sakit adalah pasien kanker payudara,” ujar perempuan yang akrab dipanggil Muti ini.

Kanker payudara tidak hanya diderita perempuan semata. Sebanyak satu dari 1.000 laki-laki beresiko terdiagnosa kanker payudara. Satu dari 100 atau 1% pasien payudara adalah laki-laki.

Meski demikian, apabila penyakit ini dapat terdeteksi sejak dini, harapan hidup mencapai 98%.

Kanker payudara belum diketahui penyebabnya. Namun faktor resiko

untuk terkena kanker ini, antara lain jenis kelamin di mana perempuan lebih beresiko ketimbang laki-laki, usia, faktor genetis, riwayat keluarga, usia awal menstruasi, tidak melahirkan atau tidak menyusui, dan pola hidup tidak sehat.

Sejumlah tanda-tanda kanker payudara seperti payudara mengeras, menumbuh, cekung, berlekuk, kemerahan, puting keluar cairan tapi bukan ASI, puting ke dalam, tumbuh pembuluh darah, mengerut seperti buah jeruk, terdapat benjolan, berubah bentuk dan kulit mengelupas.

Cara memeriksa payudara dapat dilakukan melalui “Sadari” yang dilakukan sekali sebulan pada hari ke-7 setelah awal menstruasi, USG payudara, dan mammogram.

“Kalau sudah ada tanda-tanda ini, segera ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Jika kemudian ditemukan tumor ganas, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjadi sembuh. Ini yang saya alami ketika didiagnosa terkena kanker payudara,” ia menekankan.

Untuk mengurangi resiko terkena kanker payudara, dapat dimulai dengan kebiasaan yang sehat seperti asupan makanan yang sehat serta berolahraga, cek kesehatan secara rutin, tidak merokok, diet berimbang, istirahat yang cukup serta mengelola stres.

Dalam rangkaian sosialisasi ini, salah satu pegawai Ditjen Migas, yaitu Mimin Mirnasari, membagi pengalamannya menjaga kesehatan setelah divonis terkena kanker payudara. Acara diakhiri dengan pemeriksaan kesehatan secara gratis. ●





Waspada Potensi Kebakaran, Ditjen Migas Gelar Pelatihan APAR

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggelar Pelatihan Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) di Gedung Ibnu Sutowo, Jakarta, Selasa (8/10). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman sekaligus melatih para pegawai dalam menghadapi kebakaran,

“Urusan safety merupakan salah satu hal penting dalam kegiatan kita sehari-hari, termasuk juga menjaga keamanan gedung atau rumah. Dengan pelatihan ini diharapkan kita dapat menumbuhkan kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan rumah dan gedung. Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, kita malah tidak bisa memadamkan api karena panik atau alatnya rusak,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo ketika membuka acara ini.

Dia melanjutkan, meski sebagian pegawai Ditjen Migas telah mengetahui dan mengikuti pelatihan semacam ini sebelumnya, namun kemampuan tersebut harus tetap diasah secara teratur.

“Skill itu harus diasah secara reguler. Nanti kita bisa menggunakan APAR yang ada untuk latihan,” tambahnya.

Narasumber pada pelatihan ini adalah M Tasor dari Puduklatkar Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI

Jakarta. Mengawali paparannya, Tasor mengungkapkan, kebakaran merupakan ancaman yang serius. Berdasarkan data, per tahunnya untuk Provinsi DKI Jakarta terjadi 1.500 peristiwa kebakaran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 67% kebakaran diakibatkan oleh konslet listrik.

“Kalau dirata-rata, per hari 4 sampai 5 kali terjadi kebakaran. Ini nyata dan bukan tidak mungkin mengancam gedung dan rumah kita. Ini harus mendapat perhatian serius. Alhamdulillah, Kementerian ESDM sangat concern dengan ancaman itu. Pelatihan ini tidak hanya teoretis, tapi sekaligus praktek,” papar Tasor.

Sistem manajemen keselamatan kebakaran gedung harus dilakukan baik pada sebelum, saat terjadi kebakaran, maupun setelah api berhasil dipadamkan. Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008, pemilik dan/atau pengguna bangunan yang mengelola bangunan gedung yang mempunyai potensi bahaya kebakaran ringan dan sedang I dengan jumlah penghuni paling sedikit 500 orang, wajib membentuk manajemen keselamatan kebakaran gedung. Manajemen keselamatan kebakaran gedung dipimpin oleh kepala dan wakil kepala manajemen keselamatan kebakaran gedung.

“Pada kondisi darurat, harus jelas siapa melakukan apa, siapa yang harus bertugas menelepon pemadam kebakaran, memandu penghuni ke

luar gedung dan sebagainya. Ini harus diatur,” kata Tasor.

Berkaitan dengan sistem manajemen keselamatan kebakaran ini, terdapat tiga hal yang harus dilakukan oleh manajemen Gedung, yaitu membentuk struktur organisasi pemadam kebakaran untuk menentukan dan fungsi masing-masing, menunjuk petugas jika terjadi kebakaran, dan petugas yang ditunjuk harus dilatih dengan baik.

Kebakaran pasti menimbulkan kerugian. Untuk mencegah hal tersebut, penting dilakukan identifikasi sumber bahaya, inventarisasi sarana proteksi dan jalan keluar, inspeksi uji coba berkala, tindakan pemeliharaan dan perawatan peralatan serta pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja.

Selain itu, struktur organisasi manajemen pengamanan kebakaran, gambar situsasi rute penyelamatan, rencana tindakan keadaan darurat kebakaran dan gladi/simulasi kebakaran dan evakuasi penghuni.

Pelatihan mengatasi kebakaran terdiri dari latihan kering, basah, dan simulasi evakuasi penghuni.

“Penting untuk diketahui apakah seluruh penghuni telah mengetahui pintu keluar, APAR, hidran, tombol dan lain-lain,” jelasnya. ●



Migas Raih Wilayah Bebas Korupsi

Sembilan unit satuan kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dinyatakan telah Lulus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), setelah lima unit satuan kerja kembali dinilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 dan dinyatakan mendapat predikat WBK.

Penyerahan penghargaan WBK disampaikan pada Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin yang hadir dalam pemberian penghargaan menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi. Utamanya, pada unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

“Sukses tidaknya agenda pembangunan yang diusung presiden akan bergantung pada keberhasilan reformasi birokrasi di pemerintah,” ujarnya saat

memberikan sambutan pada acara tersebut.

Instansi pemerintah harus memahami peran masing-masing dalam memberikan pelayanan yang baik dan memegang integritas birokrasi. Tingginya harapan masyarakat akan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan bebas dari KKN menuntut perbaikan birokrasi. “Perbaikan birokrasi ini perlu dilakukan dengan membangun sistem yang baik sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, murah, tidak diskriminatif, dan berkualitas,” lanjut Ma'ruf.

Zona integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Kementerian PANRB sebagai *leading sector* dan *prime mover* reformasi birokrasi terus mendorong perbaikan birokrasi salah satunya dengan pembangunan zona integritas.

Pembangunan zona integritas ini merupakan usaha yang tepat untuk mendapatkan profil instansi pemerintah yang bersih, akuntabel, dan melayani. “Semakin baik integritas birokrasi akan memperkuat public trust dan pelayanan publik,” tambah Ma'ruf.

WBK adalah miniatur RB Kementerian/Lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi Tim PANRB, dilihat dari kesesuaian data dukung dengan budaya kerja pegawai, hasil survei persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan dan anti KKN, tahun 2019 terdapat 5 satuan kerja Kementerian ESDM dinyatakan LULUS yaitu Direktorat Teknik Lingkungan Migas (Ditjen Migas), Lemigas (Balitbang ESDM), PPSDM Geominerba (BPSDM), PPSDM KEBTKE (BPSDM) dan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (Badan Geologi).

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Kementerian ESDM adalah mendorong unit lain menuju WBK, dan unit brepredikat WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, yang tentunya akan lebih sulit dan standar tinggi dari KemenPANRB. ●

Migas Goes To Campus di Universitas Jenderal Soedirman

Sejak tahun 2017, Pemerintah memberlakukan kontrak kerja sama migas skema *gross split*. Kontrak bentuk ini menandai era baru pengelolaan hulu migas di Indonesia dan diharapkan dapat meningkatkan kembali investasi migas yang semakin penuh tantangan.

Hingga saat ini, sebanyak 45 wilayah kerja (WK) migas telah menggunakan kontrak skema *gross split*, terdiri dari 17 WK hasil lelang, 23 WK terminasi dan 5 WK amandemen. Nilai komitmen eksplorasi yang diperoleh mencapai US\$ 2,71 miliar atau sekitar Rp 40,7 triliun. Sementara bonus tanda tangan sebesar US\$ 1,19 miliar atau Rp 17,8 triliun.

“Dana komitmen eksplorasi akan digunakan untuk meningkatkan penemuan cadangan. Selama ini, dana eksplorasi hanya Rp 50-70 miliar per tahun dari APBN,” papar Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Mustafid Gunawan pada acara

Migas Goes To Campus di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Jumat (8/11).

Dengan tumbuhnya investasi baru di hulu migas setelah menggunakan *gross split* ini, menjadikan Indonesia ranking 25 dari 131 negara yang atraktif tahun 2018 menurut Petroleum Economics and Policy Solutions (PEPS) E&P. Kontrak skema *gross split* juga disambut positif lembaga internasional seperti Wood Mackenzie.

Lebih lanjut Mustafid memaparkan, kontrak bagi hasil *gross split* merupakan suatu bentuk kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian *gross* produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

“Kontrak *gross split* merupakan salah satu dari dinamika yang harus dijawab oleh Pemerintah

dan pelaku industri. Selama ini kita menggunakan sistem kontrak dengan pengembalian biaya operasi atau *cost recovery*. Sejak tahun 2017, kita menggunakan bentuk kontrak kerja sama lain dan hal ini juga tercantum dalam UU bahwa dibenarkan bentuk kontrak kerja sama lain, selain *cost recovery*. Nah ini yang kita gunakan yaitu skema *gross split*,” jelas Mustafid.

Skema *gross split* memiliki tiga prinsip utama, yaitu *certainty*, *simplicity*, dan *efficiency*. Prinsip *certainty* memberikan parameter insentif jelas dan transparan, serta dapat dinilai sesuai dengan karakteristik pengembangan lapangan.

Sementara prinsip *simplicity*, mendorong bisnis proses Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel. “Dengan demikian, sistem pengadaan (*procurement*)



Adhi mengatakan, Direktorat Jenderal Migas memerlukan kemitraan bersama civitas academia dengan melibatkan langsung dalam penentuan kebijakan migas, serta *sharing knowledge* yang lebih netral. Keberadaan kampus sebagai tempat berkumpulnya civitas academia memiliki kontribusi yang nyata dalam mempengaruhi kebijakan atau regulasi yang lebih membawa kemaslahatan masyarakat Indonesia.

“Kegiatan Migas Goes to Campus di Universitas Jenderal Soedirman, diharapkan dapat menjadi wadah yang tepat bagi pemberian edukasi kebijakan Pemerintah sub sektor migas. Dan pada sisi yang sama, Pemerintah mendapat masukan bagi berlangsungnya tata kelola migas yang lebih baik,” katanya.

yang birokratis dan perdebatan yang terjadi selama ini menjadi berkurang,” kata Mustafid.

Adapun prinsip *efficiency*, mendorong para kontraktor migas dan industri penunjang migas untuk lebih efisien, sehingga mampu menghadapi gejolak harga minyak dari waktu ke waktu.

“Skema *gross split* memiliki sejumlah keunggulan yaitu memberikan hasil keekonomian yang sama atau bahkan lebih baik dari skema *cost recovery*, mempercepat satu sampai dua tahun tahapan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi, karena sistem pengadaan yang mandiri. Juga mendorong industri migas lebih kompetitif dan meningkatkan pengelolaan teknologi, SDM, sistem dan efisiensi biaya,” papar Mustafid lagi.

Formula bagi hasil kontraktor terdiri dari *base split* ditambah *variable split* yang terdiri dari 10 kriteria dan *progressive split* yang terdiri dari 3 kriteria.

Bagaimana jika bagi hasil ini ternyata kontraktor menilai keekonomian belum tercapai? Mustafid menjelaskan, badan usaha dapat mengajukan tambahan insentif ke Menteri ESDM. “Menteri bisa memberikan (insentif tambahan) setelah melalui proses evaluasi yang diperlukan untuk tambahan *split*,” paparnya.

Upaya lain yang dilakukan

Pemerintah untuk meningkatkan investasi migas adalah paradigma baru pada manajemen data migas, di mana data dapat diakses secara *online* sehingga memudahkan investor. “Kita membuka data karena hal ini pokok dalam kegiatan hulu migas,” ungkap Mustafid.

Akses data yang sifatnya umum dan data dasar, tidak dikenai biaya. Namun untuk akses data *processing* dan interpretasi melalui sistem keanggotaan.

Kemitraan Pemerintah dan Akademisi Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Dr. Ade Maman Suherman, menyambut baik kegiatan MGTC ini karena dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dosen.

Pengelolaan energi, menurut Ade, sangat penting karena hidup manusia tidak bisa lepas dari energi, termasuk migas. Dalam mengelola migas yang tidak mudah karena padat modal dan resiko tinggi, harus sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yaitu dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Pengelolaan migas harus adil, tidak hanya pro investor, tetapi dilakukan untuk memberikan kemakmuran sebanyak-banyaknya bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam rangkaian MGTC di Unsoed ini, selain dilakukan paparan dan diskusi mengenai pengelolaan usaha hulu migas di Indonesia, Ditjen Migas Kementerian ESDM juga menyerahkan buku mengenai peraturan migas Indonesia. Acara juga diisi dengan lomba foto di medsos. Bagi pemenangnya diberikan hadiah menarik. ●



Ditjen Migas Berikan Apresiasi Keselamatan Migas



Kementerian ESDM melalui Ditjen Migas memberikan apresiasi kepada badan usaha/bentuk usaha tetap, baik di kegiatan operasi hulu atau hilir dalam menjaga keselamatan dan keamanan di wilayah kerjanya di Hotel JS Luwansa, Selasa (26/11). Apresiasi ini diberikan kepada badan usaha/bentuk usaha tetap yang menerapkan kaidah-kaidah keteknikan yang baik dan keselamatan operasi migas yang mencakup keselamatan pekerja, masyarakat umum, instalasi, dan lingkungan.

Penghargaan diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Djoko Siswanto didampingi Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo, kepada 78 pemenang dari 69 badan usaha hulu dan hilir migas. Hadir pula dalam acara ini, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas M. Hidayat, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso dan Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo dalam laporannya menyatakan, pemberian Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.35 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.36 Tahun 2004 dan mengacu pada Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516 K/38/M.PE/89.

Penghargaan Bidang Keselamatan Migas PATRA NIRBHAYA KARYA diberikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan jenis usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga dengan tingkatan Utama, Madya dan Pratama yang berprestasi tanpa kehilangan jam kerja sebagai akibat kecelakaan dalam periode waktu tertentu serta memenuhi kriteria lainnya yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai.

Sementara penghargaan dengan kategori PATRA KARYA adalah

penghargaan tertinggi dari Keselamatan Migas yang diberikan kepada KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir dengan manajemen keselamatan migas yang memiliki nilai baik, dengan menggunakan dasar penilaian meliputi leading indicator (dengan bobot 60%) dan lagging indicator (dengan bobot 40%).

Djoko Siswanto mengapresiasi prestasi yang dicapai para KKKS dan badan usaha untuk menjaga keselamatan dalam kegiatan usahanya. Dikatakan, Kementerian ESDM memiliki komitmen yang kuat dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan minyak dan gas bumi yang mengutamakan aspek kualitas dan keselamatan operasi migas.

“Kami dari Ditjen Migas terus melakukan pembinaan terhadap keselamatan migas. Safety itu harus ada dan menjadi tanggung jawab masing-masing karena jika terjadi kecelakaan, tidak hanya merugikan diri sendiri, perusahaan, tetapi juga lingkungan sekitar,” ujarnya.

Djoko Siswanto juga mengharapkan agar pengetahuan dan semangat serta kesadaran mengenai keselamatan ini, dapat ditularkan ke lingkungan sekitar pekerja migas.

“Semoga budaya *safety* ini bisa ditularkan ke lingkungan sekitar karena kadang-kadang kecelakaan itu disebabkan lingkungan sekitar kita yang belum mengerti tentang *safety*. Misalnya, pihak-pihak yang melakukan *illegal drilling* karena ketidaktahuannya bahwa hal tersebut sangat membahayakan,” tambahnya lagi.

Berikut ini selengkapnya para penerima penghargaan: Penerima TANDA PENGHARGAAN KESELAMATAN KERJA MINYAK DAN GAS BUMI MANAJEMEN KESELAMATAN MIGAS (PATRA KARYA RAKSA):

1. JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi
2. PT Badak NGL
3. PT Pertamina RU VI Balongan
4. PT Jakarta Tank Terminal
5. PT Pertamina RU IV Cilacap
6. PT Pertamina RU II Dumai
7. PT Pertamina Gas Wilayah Timur
8. PT Pertamina MOR IV
9. PT Perusahaan Gas Negara Tbk GDMR

Penerima TANDA PENGHARGAAN KESELAMATAN KERJA MINYAK DAN GAS BUMI TANPA KEHILANGAN JAM KERJA SEBAGAI AKIBAT KECELAKAAN (PATRA NIRBHAYA KARYA):

1. PT Pertamina (Persero) RU VI Balongan
2. PT Badak NGL
3. PT Pertamina (Persero) RU IV Cilacap
4. PT Pertamina (Persero) RU II Dumai
5. BP Berau Ltd
6. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. GDM Reg I
7. PT Jakarta Tank Terminal
8. PT Pertamina (Persero) MOR V
9. PT Pertamina (Persero) MOR IV
10. PT Pertamina Gas Wilayah Timur
11. PT Donggi Senoro LNG
12. PT Pertamina (Persero) RU VII Sorong
13. JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi
14. PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore
15. ExxonMobil Cepu Limited
16. PT Transportasi Gas Indonesia
17. PT Maspion Energy Mitratama
18. PearlOil (Sebuku) Ltd

Penerima PATRA NIRBHAYA KARYA UTAMA:

1. Petrochina International Jabung Ltd

2. PT Pertamina (Persero) MOR I
3. PT Pertamina EP Asset 4
4. PT Pertamina Hulu Mahakam
5. ConocoPhillips (Grissik) Ltd
6. PT Pertamina Gas Project Management
7. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. GDM Reg II
8. PT Pertamina (Persero) Direktorat Megaprojek dan Petrokimia - PLBC
9. Kilang PPSDM ESDM Migas Cepu
10. PT Pertamina Gas Wilayah Barat
11. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. GTM
12. Kangean Energy Indonesia
13. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. GDM Reg III
14. PT Pertamina EP Asset 3
15. EMP Bentu Limited
16. PT Bina Bangun Wibawa Mukti
17. JOB Pertamina - Medco E&P Simenggaris
18. PT Kalimantan Jawa Gas
19. PT Pertamina EP Cepu ADK
20. PT Orbit Terminal Merak

Penerima PATRA NIRBHAYA KARYA MADYA:

1. PT Perta Arun Gas
2. PT Perta Samtan Gas
3. Citic Seram Energy Limited
4. Saka Indonesia Pangkah Limited
5. JOB Pertamina - Petrochina Salawati

6. Husky CNOOC Madura Limited
7. PT Medco E&P Indonesia
8. PT Titis Sampurna
9. MontD'Or Oil Tungkal Limited
10. Petronas Carigali Muriah Ltd
11. PT Nusantara Regas
12. Eni Muara Bakau B.V
13. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Project Management
14. PT Sumber Petrindo Perkasa
15. PT Bayu Buana Gemilang Area Barat

Penerima PATRA NIRBHAYA KARYA PRATAMA:

1. PT Pertamina (Persero) MOR III
2. PT Pertamina (Persero) MOR VII
3. PT Pertamina (Persero) MOR II
4. PT Optima Sinergi Comvestama
5. PT Medco E&P Lematang
6. PT Surya Esa Perkasa Tbk.
7. PT Energasindo Heksa Karya
8. PT Pertamina Hulu Sanga - Sanga
9. Petronas Carigali Ketapang Ltd
10. PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Unit Layanan Jaringan Gas
11. PT Sele Raya Merangin Dua
12. Mandala Energy Lemang Pte. Ltd.
13. PT Gagas Energi Indonesia
14. PT Mitra Energi Gas Sumatera
15. PT Bayu Buana Gemilang Area Timur
16. PT Visi Multi Artha. ●



Rakor Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas



Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengadakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/12). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sinergitas di antara para pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur migas, baik internal maupun eksternal.

Tema yang diambil dalam pertemuan ini adalah Refleksi 2019 dan Program Kerja 2020. Rakor dihadiri oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto, Sekretaris Ditjen Migas Iwan Prasetya Adhi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo, wakil dari Inspektorat KESDM, para pegawai di lingkungan Ditjen Migas serta undangan lainnya.

“Beberapa tahun terakhir dan ke depan, tugas Ditjen Migas antara lain didominasi oleh kegiatan-kegiatan

perencanaan dan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas), juga pembagian konverter kit (konkit) untuk nelayan dan petani. Agar kegiatan berjalan lancar, selain sinergitas, juga diperlukan akuntabilitas dalam menjalankan tugas ini,” ujar Iwan Prasetya Adhi dalam laporannya pada awal acara.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso memaparkan, pembangunan infrastruktur migas tahun 2019, secara umum sesuai target dan akan rampung pada akhir bulan Desember 2019.

Anggaran pembangunan infrastruktur migas tahun 2019 mencapai Rp789,205 miliar yang dibagi dalam empat kegiatan, yaitu pembangunan jargas di 16 lokasi sebanyak 74.216 SR, konversi BBM ke BBG untuk nelayan di 38 lokasi sebanyak 13.305 paket, konversi BBM ke BBG untuk petani di 4 lokasi dengan jumlah

1.000 paket serta review FEED-DEDC pembangunan jargas di 15 lokasi.

“Pembagian konkit untuk nelayan dan petani sudah selesai 100%. Distribusi konkit untuk petani belum merata karena ada daerah yang direlokasi (pembagian konkit) karena data-datanya persyaratan tidak tersedia,” jelas Ali.

Sementara itu, Djoko Siswanto mengapresiasi upaya yang dilakukan seluruh pihak terkait sehingga pembangunan infrastruktur tahun 2019 berjalan sesuai target. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu sangat penting karena tanggung jawab pembangunan infrastruktur migas tahun 2020 jauh lebih besar.

“Anggaran tahun 2020 sangat besar. Kita harus kompak dan dengan dukungan semua pihak, bersama-sama menyelesaikan tugas dengan baik. Jangan sampai ada temuan. Mohon mengawal administrasi keuangan,” katanya. ●

Tunjang Penerapan *Quality Assurance* (QA), Ditjen Migas Gelar *Workshop*

Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ditjen Migas menggelar *Workshop* Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan *Quantity Assurance* (QA) dan Regulasinya pada Kegiatan Usaha Hulu Migas di Bandung, Senin (2/12). Kegiatan ini bertujuan mengoptimalkan penerapan kebijakan QA pada kegiatan usaha hulu migas.

Plt Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto membuka acara tersebut. Mengawali sambutannya Djoko

mengatakan, terbitnya Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di mana salah satu agendanya adalah optimalisasi penerimaan negara dengan kriteria keberhasilan penerapan QA dalam pengelolaan *National Data Repository* (NDR).

Sebelumnya pada tahun 2016, KPK telah mempublikasikan Buku Putih yang merupakan panduan QA pada kegiatan usaha hulu migas sebagai dasar pengelolaan NDR. Buku Putih

ini merupakan hasil uji coba KPK dan SKK Migas di beberapa KKKS yang bertujuan untuk mengendalikan angka ketidakpastian dari pernyataan kuantitas suatu sistem alir mulai dari cadangan, sumur, proses hingga titik serah dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.

“Diharapkan setelah *workshop* ini, penerapan kebijakan QA pada kegiatan usaha hulu migas dapat dilaksanakan sesuai surat Sekretaris Jenderal KESDM nomor 1868/07/SJN.R/2019 tanggal

Pengelolaan WK Corridor Berlanjut, Negara Terima USD250 Juta

Kontraktor eksisting Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Corridor, yaitu ConocoPhillips (Grissik) Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Corridor, dan Talisman (Corridor) Ltd., kembali melanjutkan pengelolaan WK tersebut yang efektif berlaku sejak 20 Desember 2023. Kontraktor tersebut akan melaksanakan Komitmen Kerja Pasti 5 Tahun Pertama senilai US\$250 juta.

Penandatanganan kontrak kerja sama skema *gross split* WK Corridor dilakukan Senin (11/11). Turut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut antara lain Menteri ESDM Arifin Tasrif.

Dalam sambutannya, Arifin menyampaikan bahwa *Signature Bonus* WK Corridor merupakan yang terbesar kedua selama adanya Kontrak Kerja Sama WK Migas di Indonesia. WK Corridor merupakan salah satu WK Migas yang bernilai strategis, mengingat besarnya produksi gas bumi dari WK Corridor merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia, yaitu sekitar 1.100



MMSCF Gas Bumi perhari atau setara dengan 12% dari total produksi gas bumi nasional saat ini. Sementara produksi Minyak dan Kondensat sekitar 6,600 BOPD.

Dalam kesempatan yang sama, Djoko Siswanto menyampaikan laporan besaran Pemegang *Participating Interest* WK Corridor antara lain ConocoPhillips (Grissik) Ltd. sebesar 46%, PT Pertamina Hulu Energi

Corridor sebesar 30%, dan Talisman (Corridor) Ltd. yang saat ini berubah menjadi Repsol sebesar 24%.

“*Participating Interest* yang dimiliki oleh Kontraktor tersebut termasuk *Partisipasi Interest* 10% yang akan ditawarkan kepada BUMD dengan mengacu pada Permen ESDM No. 37 Tahun 2016,” imbuh Djoko. ●

24 Oktober 2019 hal pemantauan aksi pencegahan korupsi periode B12, di mana pada aksi no 6 target B12 adalah terdiseminasi kebijakannya penerapan QA paling lambat tanggal 20 Desember 2019,” ujar Djoko.

Di kegiatan hulu migas, lanjut dia, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari penerimaan pajak dan non pajak. Salah satunya adalah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menangani kasus *illegal tapping* dan *illegal drilling*.

“Adapun untuk sektor hilir, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan

hilirisasi sektor migas melalui program pengembangan kilang-kilang baru, peningkatan pemanfaatan gas melalui perluasan jaringan gas rumah tangga dan pemakaian konverter kit di seluruh wilayah Indonesia, demi mewujudkan ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, telah menginisiasi NDR. Melalui pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2019-2020, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM telah ditetapkan sebagai Pengelola NDR.



“Pusdatin Kementerian ESDM tidak hanya mengurus data Migas namun juga terkait semua data yang dikelola oleh Kementerian ESDM,” katanya.

Djoko mengharapkan agar para peserta dapat memberikan masukan untuk penyusunan rancangan pedoman penerapan QA dan regulasinya pada kegiatan usaha hulu migas. ●

Konversi BBM ke BBG Terus Berlanjut, SPBG dan Jargas Karawang Diresmikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong Program Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) sebagai energi yang murah, bersih dan ramah lingkungan. Antara lain melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas).

Bertempat di SPBG (Karawang International Industrial City/KIIC) Jl Permata Raya, Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahril, didampingi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto, serta First Secretary Embassy of Japan in Indonesia, Nakayama Fumihiro, Selasa (17/12), meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga di Kabupaten Karawang, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, pengguntingan pita serta pengisian BBG ke kendaraan roda 4.

SPBG ini merupakan kerja sama Ditjen Migas dengan NEDO Jepang melalui MoU tentang "Demonstration Project for the Spread of Compressed Natural Gas Vehicles and Refueling Infrastructure including Support of Development of Sustainable Environment" yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2017 dengan jangka waktu kerja sama hingga tahun 2021.

Pelaksana kerja sama hibah di pihak Ditjen Migas diwakili oleh PT Pertamina (Persero) dan NEDO diwakili *Entrusted Parties* (Toyota Motor Corporation, Toyota Tsusho



Corporation, Hino Motors Ltd., Toho Gas Engineering Co., Ltd. dan Japan Automobile Research Institute).

"Melalui proyek tersebut, rencananya akan dibangun 3 SPBG yaitu SPPG KIIC Karawang, SPBG di Jalan Abdul Muis Jakarta dan SPBG di Jalan Sudirman Kota Tangerang. Selain itu, peminjaman kendaraan CNG untuk *user monitoring* kepada Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) serta 18 unit truk untuk *supply* di Kawasan Industri Karawang," ungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dalam laporannya pada peresmian ini.

Pembangunan SPBG Karawang telah rampung dan telah dilakukan *commissioning* pada November tahun 2019, sedangkan SPBG

Jalan Abdul Muis Jakarta dan Jalan Sudirman Tangerang ditargetkan selesai pada Maret tahun 2020.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahril mewakili Menteri ESDM mengatakan, Program Konversi BBM ke BBG ini merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah dalam melaksanakan diversifikasi energi melalui pengembangan energi bersih. Produksi gas bumi nasional cukup besar sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk penggunaan dalam negeri dan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah mengharapkan dengan berdirinya SPBG KIIC ini, dapat mendorong masyarakat menggunakan kendaraan berbahan bakar CNG yang ramah lingkungan. "Selain itu juga dapat melayani kebutuhan bahan bakar CNG untuk

kendaraan khususnya di wilayah Kabupaten Karawang," katanya.

First Secretary Embassy of Japan in Indonesia, Nakayama Fumihiro, dalam kesempatan ini menyatakan, Pemerintah dan perusahaan swasta Jepang mendukung upaya Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi bahan bakar, demi menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Lebih lanjut Fumihiro mengungkapkan, berkaca dari negara-negara lain yang telah menggunakan kendaraan berbahan bakar CNG, hal ini dimungkinkan karena adanya kebijakan Pemerintah yang mendorong penggunaan kendaraan berbahan bakar CNG. "Saya berharap Pemerintah Indonesia dapat membangun sistem untuk mendorong kendaraan CNG," tambahnya.

Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Karawang, Ahmad Hidayat, atas nama warga Karawang, menyampaikan apresiasinya atas dibangunnya SPBG ini. Infrastruktur ini tentunya akan sangat membantu Kabupaten Karawang yang merupakan pusat pergerakan industri di Indonesia. Kawasan ini diminati investor asing untuk mendirikan bisnisnya di sana, Berbagai macam perusahaan banyak berdiri, seperti perusahaan industri otomotif, elektronik, IT dan bentuk usaha lainnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Alimuddin Baso, *Director Executive* NEDO Izuru Kobayashi, Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero) Basuki Trikora Putra serta Direktur Utama PT PGN Gigih Prakoso.

Jargas Kabupaten Karawang Usai acara peresmian di SPBG, Sekjen Kementerian ESDM Ego Syahril beserta rombongan juga melakukan tinjauan lapangan ke lokasi jaringan



distribusi gas bumi di Kecamatan Karawang Barat.

Jargas Kabupaten Karawang dibangun menggunakan APBN tahun 2019 sebanyak 6.952 Sambungan Rumah (SR) yang dilengkapi dengan pemberian kompor gas alam. Untuk pembangunannya, Ditjen Migas dibantu oleh PT Pertamina (Persero) melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*sub holding* gas bumi). Jargas dibangun di Kelurahan Teluk Jambe, Sirnabaya, Puseur Jaya dan Adiarsa Barat. Sumber pasokan gas berasal dari Wilayah Kerja PT Pertamina EP sebanyak 0,2 mmscfd dengan titik *tie-in* ke pipa distribusi milik PT PGN Tbk.

Kabupaten Karawang dipilih karena memenuhi beberapa kriteria antara lain dekat dengan infrastruktur eksisting pipa gas serta adanya dukungan Pemerintah Daerah setempat.

Hal ini ditindaklanjuti dengan ditandatangani Nota Kesepahaman antara Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pemerintah Kabupaten Karawang tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Wilayah Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Nomor 0008.Pj/05/DJM.II/2019 dan 073/1203/KSM tanggal 13 Maret 2019.

Program ini bertujuan memberikan akses energi kepada masyarakat, memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar,

membantu ekonomi masyarakat menuju ekonomi masyarakat mandiri dan ramah lingkungan.

"Pemerintah berkomitmen akan terus mendorong dan mempercepat program jargas, sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat besar penggunaan gas bumi," ujar Ego Syahril.

Harga gas untuk jargas rumah tangga Kabupaten Karawang telah ditetapkan oleh BPH Migas melalui Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, diundangkan tanggal 10 Desember 2019.

Pembangunan jargas dilaksanakan Pemerintah sejak tahun 2009. Untuk tahun 2019, jargas dibangun sebanyak 74.216 SR di 16 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Jambi, Kota Palembang, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kota Lamongan, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Wajo.

Untuk tahun 2020, Pemerintah akan membangun 266.070 SR di 49 kabupaten/kota dengan anggaran Rp 3,029 triliun. ●

Plt Dirjen Migas Dampingi Menteri ESDM ke Kilang Balikpapan dan Blok Mahakam



Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mendampingi Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, Jumat (8/11). Fasilitas yang dikunjungi adalah lokasi pembangunan *Refinery Development Master Plan (RDMP)*, RU V Balikpapan, dan Blok Mahakam. Proyek RDMP Kilang RU V Balikpapan merupakan salah satu dari empat kilang yang akan ditingkatkan kapasitasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menteri ESDM menyampaikan apresiasi dan menekankan pentingnya *project monitoring and controlling* serta mengharapkan agar proyek bisa dipercepat tiga bulan dengan tetap menjaga keselamatan kerja dan memperhatikan kemampuan karyawannya.

“Bekerja itu harus cermat, jangan ragu-ragu untuk mencari mitra-mitra

yang bisa mendukung tercapainya hasil tersebut dengan resiko yang bisa kita kendalikan, kemudian juga dengan program-program investasi yang massif itu kita bisa selain memikirkan kemampuan *finance* juga *man power* kita,” ujar Arifin.

Proyek RDMP Kilang Balikpapan selain meningkatkan kapasitas kilang 100.000 barel per hari juga akan meningkatkan kualitas produk BBM dari setara Euro II menjadi setara Euro V. Proyek dengan total nilai investasi US\$ 6,5 miliar ini direncanakan akan mulai beroperasi pada bulan Juli tahun 2023 untuk *phase 1* dan tahun 2025 untuk *phase 2*, pada tahap konstruksi ini diperkirakan menyerap sekitar 15.000 tenaga kerja dan sekitar 800 orang pada saat kilang sudah beroperasi. ●



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910, Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980



Manfaatkan Energi dengan Bijak

Guna Mewujudkan
Ketahanan Energi Untuk Negeri

Terutama energi fosil yang tidak dapat diperbaharui...
Agar masih dapat dirasakan anak cucu kita nanti...



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

GEDUNG IBNU SUTOWO
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B 5, Jakarta 12910
Telp. (021) 526 8910, Fax. (021) 526 8980
www.migas.esdm.go.id